

**PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMILIH CALON BUPATI
GOWA PADA PILKADA 2015 KABUPATEN GOWA**



S K R I P S I

Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Ilmu Politik
Pada Jurusan Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

OLEH :

Muhammad Akbar

E111 12 256

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2016

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMILIH CALON
BUPATI GOWA PADA PILKADA 2015 KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AKBAR

E 111 12 256

Telah Dipertahankan Di hadapan Tim Penguji Skripsi


Pada Tanggal 7 Oktober 2016

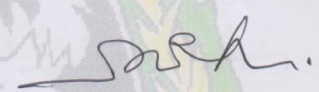
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA
NIP 19420606 198103 1 001



A. Naharuddin, S.Ip M.Si
NIP 19731122 200212 1 001

Mengetahui,

Ketua Departemen
Ilmu Politik Pemerintahan

Ketua Prodi Ilmu Politik


Dr. H. A. Samsu Alam, M.Si.
NIP 19641231 198903 1 027


A. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si.
NIP 19801114 200812 1 003

LEMBAR PENERIMAAN

SKRIPSI

PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM MEMILIH CALON
BUPATI GOWA PADA PILKADA 2015 KABUPATEN GOWA

Disusun dan diajukan oleh

MUHAMMAD AKBAR

E 111 12 256

Telah diperbaiki dan dinyatakan telah memenuhi syarat oleh panitia ujian skripsi pada
Program Studi Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Makassar, Pada Hari Jumat 7 Oktober 2016

Menyetujui,

PANITIA UJIAN:

Ketua : Prof. Dr. Kausar Bailusy, MA

Sekretaris : A. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si

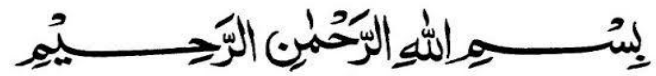
Anggota : Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si

Anggota : Dr. Ariana Yunus, M.Si

Anggota : A. Naharuddin, S.Ip, M.Si

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

KATA PENGANTAR



Segala puji serta dengan penuh rasa syukur yang dalam, penulis memanjatkan doa yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT, pencipta langit dan bumi serta apa yang ada diantara keduanya, pemilik kesempurnaan, meliputi segala ilmu pengetahuan serta kuasa yang tiada batas kepada penulis, serta sholawat dan salam selalu senantiasa tercurahkan dari hati yang paling dalam kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai pembawa cahaya serta petunjuk kepada seluruh umat manusia hingga akhir zaman.

Sehubungan dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan serta dukungan yang sangat berharga dari berbagai pihak sulit rasanya untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu melalui penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terima kasih serta memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada berbagai pihak yang telah mengarahkan dan mensupport penulis antara lain kepada:

1. Kedua orang tua penulis, sebagai penyemangat hidup di dunia ini, bagi penulis di dunia yang sangat penulis hormati dan sayangi, Ayahanda **Muhammad Tang** dan Ibunda **Hj. Andi Hasnah** yang telah mencurahkan seluruh kasih sayang, cinta dan pengorbanan keringat dan air mata. Untaian doa serta pengharapan tiada henti, yang hingga kapan dan dimanapun

penulis takkan bisa membalasnya. Maafkanlah jika ananda sering menyusahkan, merepotkan, serta melukai perasaan Ayahanda dan Ibunda. Keselamatan dunia dan akhirat semoga selalu untukmu. Inshaa Allah Sang Khalik selalu menyentuhmu dengan Cinta-Nya. Layaknya cinta yang telah tumpah untuk penulis darimu..

2. Terima kasih kepada bapak **Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp. B. Sp. BO. FICS.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2004-2014 dan ibu **Prof. Dwi Aries Tina, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin periode 2014-sekarang.
3. Bapak **Prof. Dr. Andi Alimuddin Unde, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan **Dr. H. Andi Samsu Alam, M.Si.** selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan serta ibu **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.** selaku Plt Program Studi Ilmu Politik Fisip Unhas.
4. Bapak **Prof. Dr. M. Kautsar Bailusy, MA.** selaku Pembimbing I dan **A. Naharuddin, S.Ip. M.Si..** selaku Pembimbing II yang senantiasa memberikan segala dorongan, motivasi, pengetahuan, dan bimbingan untuk senantiasa tegar dalam memberikan arahan, terima kasih atas segala keramahannya baik dalam selama kuliah maupun dalam penyelesaian penulisan tugas akhir ini. Hanya doa yang dapat kami

persembahkan agar senantiasa mendapatkan curahan rahmat dunia dan akhirat.

5. Hormatku kepada saudaraku **Riswan** (Almarhum), **Fhandhy** dan **Alamsyah**, serta keponakanku **Athirah, Askia dan Athifah** yang tidak pernah putus memberikan keceriaan dan doa serta dukungan kepada penulis baik secara moril maupun materil, skripsi ini penulis dedikasikan untuk kebanggaan keluargaku.
6. Terkhusus kepada Dosen Pembimbing Akademik saya **Dr. Gustiana A. Kambo, M.Si.** serta dosen pengajar **Prof. Dr. M. Kausar Bailusy, MA. Prof. Dr. Armin Arsyad, M.Si. Naharuddin, S.Ip, M.Si. Drs. H. A. Yakub, M.Si. Dr. Ariana Yunus, M.Si. Sakinah Nadir, S.Ip, M.Si. Ali Armunanto, S.Ip, M.Si. Dr. Muhammad Saad, MA. Endang Sari, S.Ip, M.Si.** Terima kasih atas segala kepercayaan serta prinsip-prinsipnya yang teramat sangat banyak memberikan lilin-lilin kehidupan bagi penulis.
7. Seluruh staf Jurusan Ilmu Politik dan Pemerintahan dan para staf Akademik serta pegawai lingkup FISIP Universitas Hasanuddin yang telah membantu penulis selama penulis menuntut ilmu di Universitas Hasanuddin.
8. Rasa solidaritas dan ungkapan terima kasih terdalem penulis peruntukan kepada saudara-saudara seperjuangan dan sepenanggungan yang telah memberikan arti dan makna akan

adanya ikatan persaudaraan, perjuangan, dan kebersamaan yang selama ini penulis rasakan. Untuk **Ade Putri M, S.Ip. Tanti Purwanti, S.Ip. Nur Anida, S.Ip. Nina Rahmayanti, S.Ip. Ety Gustin MW, S.Ip, Sukardi Reskiawan, S.Ip. Amal Nur, S.Ip. Afryana A. Lery, S.Ip. Ana, Ucham, Ike, Fitry, Winny, Osink, Arfan, Ari, Kifli, Ayos, Wiwin, Roslan, Dirham, Ulla, Fajar, Aan, Olan, Cimin, Adi, Akmal, Qurais, Irfan, Fadli, Mamat, dan Nanang.** Terima kasih atas kebersamaan dalam suka dan duka yang telah kita lalui bersama. Untuk yang belum sarjana, semoga cepat menyusul, amin.

9. Kepada rekan-rekan, senior-senior, dan junior-junior **HIMAPOL FISIP UNHAS** yang tak dapat kusebut satu per satu, atas didikan, arahan, ilmu, kepercayaan, motivasinya, menjadi pedoman mengarungi perjalanan panjang sebagai mahasiswa di Universitas Hasanuddin.
10. Kepada teman-teman KKN Gelombang 90 Kabupaten Sinjai, Kecamatan Sinjai Utara, terkhusus Posko Kelurahan Bongki, **Nurdiyah Ismi R, S.H. Yulia Irwina B, S.Pt. Nur Kholiq, Asnidar,** dan **Ade Gita R.** Terima kasih atas kerja sama, kebersamaan, waktu, dan kenangan selama KKN telah memberikan kenangan terindah dengan mengenal kalian. Untuk yang belum sarjana, semoga cepat menyusul, amin.

11. Kepada Bapak **Akbar Andi Mappa** selaku Lurah Bongki beserta seluruh staf dan pegawai Kelurahan Bongki, Bapak **A. Mappijanci** dan Ibu **Hj. Husni** yang telah menjadi orang tua kami selama KKN, menerima dan mengizinkan kami untuk tinggal dirumahnya, Kak Fikar, Kak Agung, Kak Fian, Kak Wawan, dan seluruh Pemuda Kampoeng Litha yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu, dan seluruh masyarakat Kelurahan Bongki yang telah menerima dan menyambut kami dengan hangat. Sekali lagi terimah kasih.

12. Kepada teman-teman SMAN 12 Makassar, khususnya **Yusuf Fauzi D, S.Kom. M. Irfan Ramli, S.E. I Putu D, S.Kom. Rahman Sofyan, S.E.** dan **Rahmat** yang selama ini menjadi teman berkumpul, teman berbagi cerita sekaligus memberikan dukungan selama ini, terimah kasih.

13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada para informan atas segala waktu yang diluangkan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan memberikan informasi yang penulis butuhkan.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidupku. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dalam garis hidupku, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya, kepada Allah SWT yang telah menganugrahkan mereka dalam kehidupan saya.

Akhirnya penulis menyadari di dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari berbagai pihak, dan sekali lagi penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bantuan, perhatian, dukungan, bimbingan, dan kerjasamanya sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan.

Makassar, September 2016

Muhammad Akbar

ABSTRACT

MUHAMMAD AKBAR (E111 12 256), with the skripsi title Partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon independen pada pilkada 2015 Kabupaten Gowa. Supervised by M. Kausar Bailusy as supervisor I and A. Naharuddin as supervisor II.

Elections Gowa 2015 followed by five pairs of candidates. Two pairs of them progress through independent lines, the presence of independent candidates in the election District of Gowa is not the first time it happened, because at the elections of 2010 there are also candidates by independent lines. The difference between the elections in 2010 and 2015 is at Gowa 2015 elections won by couples who progress through independent paths. Based on these phenomena, then authors conducted a study to answer research questions about public participation in selecting independent candidates, and also what factors influence people in choosing an independent candidate.

This research was conducted in Somba Opu district and Bajeng district, Gowa regency, South Sulawesi. The method used is a qualitative research method with descriptive type analysis. Techniques used in the data collection through in-depth interviews to several informants as well as from other sources associated with this research. Then the data obtained will be reduced by the purposes and concluded to be served.

The results of this study show that, people in Gowa better see the figure of the candidate rather than the lines used, be it via the melalului line as well as the independent party is not a problem for the community. This indicates that the presence of independent candidates in the election District of Gowa does not affect the participation of the community. There are any factors that affect the public in choosing independent candidates at the election District of Gowa by 2015, i.e., (1) Figure Ichsan Yasin Limpo, (2) the utilization of the power of the bureaucracy, (3) the mass mobilization of voters.

Keywords: Independent, Election, Participation

ABSTRAK

MUHAMMAD AKBAR (E111 12 256), dengan judul skripsi Partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon independen pada pilkada 2015 Kabupaten Gowa. Di bawah bimbingan M. Kausar Bailusy sebagai pembimbing I dan A. Naharuddin sebagai pembimbing II.

Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 diikuti oleh lima pasang calon. Dua pasang diantaranya maju melalui jalur independen, kehadiran calon independen dalam Pilkada Kabupaten Gowa bukan pertama kalinya terjadi, karena pada Pilkada 2010 juga terdapat calon melalui jalur independen. Yang membedakan antara Pilkada 2010 dan 2015 ialah, pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan yang maju melalui jalur independen. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam memilih calon independen dan juga faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen.

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Somba Opu dan di Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yakni melalui proses wawancara mendalam kepada beberapa informan serta dari sumber-sumber lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian data yang diperoleh akan direduksi berdasarkan keperluan serta disimpulkan untuk disajikan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, masyarakat di Kabupaten Gowa lebih melihat sosok kandidat ketimbang jalur yang digunakan, baik itu melalui jalur partai maupun melalui jalur independen tidak menjadi masalah bagi masyarakat. Hal ini mengindikasikan bahwa kehadiran calon independen pada Pilkada Kabupaten Gowa tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat. Ada pun faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, yakni, (1) Figur Ichsan Yasin Limpo, (2) Pemanfaatan kekuatan birokrasi, (3) Mobilisasi Massa Pemilih.

Kata kunci: Independen, Pilkada, Partisipasi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENERIMAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Partisipasi Politik	11
1. Pengertian Partisipasi Politik	13
2. Model dan Bentuk Partisipasi Politik	18
B. Perilaku Pemilih (Voting Behavior)	19
1. Pendekatan Psikologis	23
C. Kepercayaan Politik	25
D. Kerangka Pikir	30
E. Skema Kerangka Pikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	33
B. Dasar dan Tipe Penelitian	34
C. Sumber Data	35

D. Teknik Pengumpulan Data	36
E. Teknik Analisis Data	37

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Profil Singkat Kabupaten Gowa	39
B. Profil Singkat Kecamatan Somba Opu	43
C. Profil Singkat Kecamatan Bajeng	45
D. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa.....	51

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Independen.....	55
B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Calon Independen.....	66
1. Figur Ichsan Yasin Limpo	66
2. Pemanfaatan Birokrasi.....	71
3. Mobilisasi Pemilih Pada Pemilihan	76

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel	Nama Tabel	Halaman
1	Banyaknya Desa Kelurahan, Lingkungan, Dusun RW/RK, RT Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa	40
2	Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Gowa, 2010-2014	41
3	Kepadatan Penduduk di Kecamatan Somba Opu Tahun 2012-2014	44
4	Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Desa/Kelurahan	50
5	Partisipasi Pemilih Masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2005, 2010, dan 2015	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Nama Gambar	Halaman
1	Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.....	7
2	Skema Kerangka Pikir.....	32
3	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa	42
4	Presentase Penduduk Kecamatan Somba Opu Menurut Kelurahan Tahun 2014	44
5	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Somba Opu	45
6	Presentase Luas Wilayah Kecamatan Bajeng Menurut Desa/Kelurahan	49
7	Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Bajeng	50
8	Grafik Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan umum adalah sesuatu hal yang penting dalam kehidupan kenegaraan. Pemilihan umum adalah perwujudan sistem demokrasi. Melalui pemilihan umum rakyat memilih wakilnya untuk duduk dalam parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Ada Negara yang menyelenggarakan pemilihan umum hanya apabila memilih wakil rakyat untuk duduk dalam parlemen, akan tetapi ada pula Negara yang juga menyelenggarakan pemilihan umum untuk memilih para pejabat tinggi Negara. Umumnya, yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu adalah partai-partai politik. Partai politik yang menyalurkan aspirasi rakyat dan mengajukan calon-calon untuk dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum itu.¹

Sejak ditetapkannya Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, maupun Walikota atau Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik. Dipilihnya sistem pilkada langsung mendatangkan optimisme dan pesimisme tersendiri. Pilkada langsung dinilai sebagai perwujudan pengembalian

¹ Teuku May Rudy, *Pengantar Ilmu Politik*, Refika, Bandung, 2003. Hal 87.

hak-hak dasar masyarakat di daerah dengan memberikan kewenangan yang utuh dalam rangka rekrutmen pimpinan daerah sehingga mendinamisir kehidupan demokrasi di tingkat lokal. Keberhasilan pilkada langsung untuk melahirkan kepemimpinan daerah yang demokratis, sesuai kehendak dan tuntutan rakyat sangat tergantung pada kritisisme dan rasionalitas rakyat sendiri.²

Gagasan pilkada langsung itu pada dasarnya merupakan proses lanjut dari keinginan kuat untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah yang telah dimulai. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Robert A. Dahl, disamping untuk menghindari tirani, demokrasi juga dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang lain, diantaranya adalah terwujudnya hak-hak esensial individu, terdapat kesempatan untuk menentukan posisi dari individu, dan adanya kesejahteraan.³

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik dan jalur kedua melalui calon independen atau yang biasa di sebut jalur perseorangan. Mencermati keberadaan calon independen, maka sebenarnya sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam judicial review terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa calon

² Joko J. Prihatmoko. Pemilihan Kepala Daerah Langsung. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar. 2005. Hal 1-2.

³ Dapat dilihat di <http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pemilihan-kepala-daerah.html> diakses pada tanggal 2 april 2016.

independen dalam pilkada diperbolehkan menimbulkan optimisme baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Pelaksanaan pilkada memang diharapkan akan semakin semarak dengan tampilnya calon independen dalam kancah politik di daerah. Melihat realita sosial yang ada, keberadaan calon independen dalam pilkada memang sudah tidak dapat dihindarkan. Masyarakat selama ini merasakan bahwa calon dari partai politik kurang mewakili aspirasi mereka. Munculnya calon independen ini merupakan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Peran rakyat dalam rekrutmen politik diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti hadirnya calon independen yang merupakan wujud dari kekecewaan terhadap pencalonan melalui jalur partai politik.

Jika masyarakat lebih memilih calon independen maka dikhawatirkan fungsi partai politik sebagai sarana penyalur aspirasi rakyat tidak dapat dioptimalkan. Selama ini masyarakat cenderung tidak mempercayai partai politik. Sebab, partai politik selama ini hanya mementingkan sekelompok golongan tertentu saja. Pengembangan kader dalam partai politik akan mengalami hambatan yang cukup berarti bila calon independen menjadi opsi bagi ketidakpercayaan masyarakat terhadap partai politik. Calon independen sangat menguntungkan bagi masyarakat, karena mereka dapat memilih pemimpin mereka tanpa melalui partai politik. Calon dari partai politik selama ini juga sering diduga cenderung korup, sebab mereka selalu memberikan mahar bagi partai

politik untuk meloloskan pencalonannya. Selain itu keberadaan calon independen dalam pilkada akan memberikan pelajaran politik bagi masyarakat.

Calon independen memang harus orang yang benar-benar kompatibel dan kompeten. Jangan sampai calon kepala daerah adalah calon asal-asalan sebagai buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap partai politik. Keberadaan calon independen dalam pilkada akan memberikan nuansa baru dalam pelaksanaan demokrasi, walaupun calon independen juga memiliki konsekuensi yang berat. Dengan tanpa dukungan partai politik maka kebijakan kepala daerah akan mengalami sedikit hambatan karena tidak didukung oleh legislatif. Meskipun bertarung sendirian tanpa dukungan partai politik, pada akhirnya pimpinan daerah yang merupakan calon independen tetap harus mengadakan kerja sama dengan fraksi yang berkuasa. Karena mau tidak mau kebijakan pemerintah daerah tetap diawasi oleh DPRD.

Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran serta keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematis dan berkala. Oleh karenanya

pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergerakaknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Seiring dengan berkembangnya pemilihan umum di Indonesia, tingkat kesadaran penduduk juga ikut berkembang. Banyak faktor yang bisa saja mempengaruhi hal itu. Partisipasi politik masyarakat sendiri bisa saja mempengaruhi apa yang menjadi pilihan politik individu atau masyarakat itu sendiri. Latar belakang pemilih juga mempengaruhi segala pendekatan-pendekatan terhadap pemilih. Namun pendekatan terhadap pemilih tersebut sangat dipengaruhi oleh media, sosialisasi politik dan lain-lain.⁴

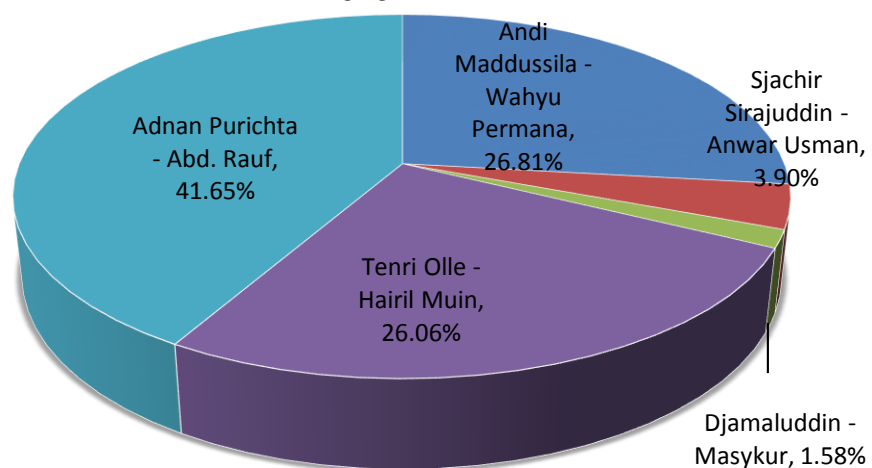
Sebanyak 11 (sebelas) daerah tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pilkada serentak tahun 2015 untuk mencari bupati dan wakil bupati terpilih. Sebelas daerah ini yaitu: Selayar, Bulukmba, Gowa, Maros, Pangkep, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur.

Pada Pilkada kabupaten Gowa, dalam pilkada tersebut diikuti oleh 5 pasang calon bupati dan wakil bupati, dimana 3 pasang diantaranya diusung oleh partai politik, yakni pasangan Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E. pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS dan PKB. Pasangan Drs. H. Sjachrir Sjarifuddin Dg. Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman. Pasangan didukung oleh Partai Golkar. Pasangan Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H, M.Si dan H. Hairil Muin, M.Si. pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem dan PPP. Sementara itu 2 pasang lainnya yang melalui jalur independen, yakni

⁴ Soekarno, Hatta dalam skripsi perilaku memilih mahasiswa pada pemilihan umum legislative 2009 di kabupaten sinjai. Hal . 5

pasangan Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P, M.Si serta pasangan Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.si. Adapun hasil perolehan suara pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 dapat dilihat pada gambar 1. berikut ini.

Gambar 1.
Persentase Hasil Perolehan Suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015



Hasil pemilihan tersebut memenangkan salah satu pasangan independen, yaitu Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.Si.⁵ Hal tersebut sangat menarik karena sepertinya kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung oleh partai politik sudah mulai berkurang. Penelitian ini ingin melihat apa yang menyebabkan masyarakat lebih memilih calon yang berasal dari jalur independen. Apakah karena kepercayaan mereka terhadap partai politik sudah berkurang atau disebabkan adanya hal lain. Karena dalam pilkada praktek-praktek politik uang banyak terjadi, selain itu, penyalahgunaan fasilitas pemerintah khususnya sering dipakai sebagai alat kemenangan

⁵ Dapat dilihat di <https://pilkada2015.kpu.go.id/gowakab> diakses pada tanggal 10 Maret 2016.

termasuk juga mesin birokrasi yang sering kali dipakai untuk alat kepentingan pilkada. Terlebih lagi melihat pasangan yang terpilih ini merupakan anak dari mantan Bupati Kabupaten Gowa sebelumnya, hal ini bisa saja mempengaruhi partisipasi masyarakat. Namun, jika dibandingkan dengan hasil Pilkada Gowa tahun 2005 dan tahun 2010, jumlah partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa pada Pilkada tahun 2015 justru menurun. Jumlah partisipasi pemilih pada pilkada kabupaten Gowa tahun 2005 mencapai angka 81.71% dari total 377.031 pemilih, dan pada tahun 2010 mencapai angka 74.71% dari 447.690 pemilih, sementara pada pelaksanaan pilkada tahun 2015 jumlah partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa hanya 65.71% dari 544.795 pemilih yang ada.

Melihat realita partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa yang menurun di setiap pelaksanaan pilkada, maka disini penulis ingin melihat apakah yang membuat partisipasi masyarakat Kabupaten Gowa menurun, apakah karena partisipasi masyarakatnya yang bersifat mobilisasi ataukah bersifat otonom. Berdasarkan fenomena yang terjadi, maka dari itu penulis mengambil judul: **Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa.**

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan luasnya cakupan masalah yang akan diteliti mengenai **“Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Bupati Gowa Pada Pilkada 2015 Kabupaten Gowa”** maka penulis membatasinya pada persoalan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi politik masyarakat dalam memilih calon independen?
2. Faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mendiskripsikan partisipasi politik masyarakat kabupaten gowa dalam memilih calon independen.
2. Mendiskripsikan Faktor apakah yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, khususnya partisipasi politik.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini di harapkan dapat memperjelas tentang partisipasi politik dalam pembangunan perpolitikan di Indonesia
- b. Hasil penelitian ini nantinya juga di harapkan dapat menjadi rujukan dalam melakukan penelitian-penelitian yang serupa di tempat lain.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini akan membahas beberapa aspek, yaitu : Partisipasi Politik, Perilaku Pemilih, Pendekatan Psikologis, Kepercayaan Politik, Kerangka Pemikiran Dan Skema Kerangka Pikir. Semuanya akan diuraikan lebih lanjut.

A. Partisipasi Politik

Partisipasi politik secara harfiah berarti keikutsertaan, dalam konteks politik hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya, karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik.

Pada abad 14, hak untuk berpartisipasi dalam hal pembuatan keputusan politik, untuk memberi suara, atau menduduki jabatan pemerintah telah dibatasi hanya untuk sekelompok kecil orang yang berkuasa, kaya dan keturunan orang terpandang.⁶ Kecenderungan kearah partisipasi rakyat yang lebih luas dalam politik bermula pada masa *renaissance* dan reformasi abad ke 15 sampai abad ke 17, abad 18 dan 19. Tetapi cara-cara bagaimana berbagai golongan masyarakat (pedagang, tukang, orang-orang professional, buruh kota, wiraswasta industry, petani desa dan sebagainya), menuntut hak mereka untuk

⁶ Mas' Oed, Perbandingan Sistem Politik, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), hlm 45

berpartisipasi lebih luas dalam pembuatan keputusan politik sangat berbeda di berbagai Negara.⁷

Menurut Myron Weiner seperti dikutip oleh Mas' Oed, paling tidak terdapat lima hal yang menyebabkan timbulnya gerakan kearah partisipasi lebih luas dalam proses politik, seperti yang disampaikan Myron Weiner yaitu:⁸

- a. Modernisasi; komersialisasi pertanian, industrialisasi, urbanisasi yang mengikat, menyebarnya kepandaian baca-tulis, pengembangan media komunikasi massa.
- b. Perubahan-perubahan struktur kelas sosial; ketika terbentuk suatu kelas baru dan kelas menengah yang meluas dan berubah selama proses industrialisasi dan modernisasi, masalah tentang siapa yang berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik menjadi penting dan mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pola partisipasi politik.
- c. Pengaruh kaum intelektual dan komunikasi massa modern; kaum intelektual seperti sarjana, wartawan dan penulis sering mengeluarkan gagasan dan ide kepada masyarakat umum untuk membaktikan tuntutan akan partisipasi massa yang luas dalam pembuatan keputusan politik. Dan sistem transportasi, komunikasi modern memudahkan dan mempercepat penyebaran ide dan gagasan tersebut.

⁷ Ibid, hlm 45

⁸ Arifin Rahman, Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Structural Fungsional (Surabaya: Penerbit SIC, 2002), Hlm 130-131

- d. Konflik di antara kelompok-kelompok pemimpin politik, jika timbul kompetisi perebutan kekuasaan, salah satu strategi yang digunakan adalah mencari dukungan rakyat untuk melegitimasi mereka melalui gerakan-gerakan partisipasi rakyat.
- e. Campur tangan pemerintah yang berlebihan dalam masalah sosial, ekonomi, dan budaya; jika pemerintah terlalu menkooptasi masalah-masalah sosial masyarakat, maka lambat laun akan merangsang timbulnya tuntutan-tuntutan yang terorganisir untuk berpartisipasi.

1. Pengertian partisipasi politik

Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Sebagai definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan cara memilih pimpinan Negara dan secara langsung dan secara tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*).⁹ Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum atau kepala daerah, menghadiri kegiatan (kampanye), mengadakan hubungan (*contacting*) dengan pejabat pemerintah, atau anggota parlemen dan sebagainya.

⁹ Sudijono Sastroatmodjo, *Perilaku Politik*. (Semarang: Ikip Semarang Press, 1995), Hlm 68.

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan Negara demokrasi sekaligus merupakan cirri khas adanya modernisasi politik. Di Negara-negara yang proses modernisasinya secara umum telah berjalan dengan baik, biasanya tingkat partisipasi warga negaranya meningkat. Modernisasi politik dapat berkaitan dengan aspek politik dan pemerintahan. Partisipasi politik pada dasarnya merupakan kegiatan yang dilakukan warga Negara untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dengan tujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah.

Partisipasi politik memiliki pengertian yang beragam. Ada beberapa ahli yang mengungkapkan pendapatnya tentang partisipasi politik. Menurut Ramlan Surbakti yang dimaksud dengan partisipasi politik adalah keikutsertaan warga Negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang mengangkut atau mempengaruhi hidupnya.¹⁰ Herbert McClosky seorang tokoh masalah partisipasi berpendapat bahwa partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijakan umum.¹¹

Dalam hubungannya dengan Negara-negara berkembang Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson member tafsiran yang lebih luas dengan

¹⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia, 2007), Hlm. 140 .

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), Hlm. 367.

memasukkan secara eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi politik adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadic, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif.

Menurut Samuel P. Huntington pengertian partisipasi politik adalah kegiatan warga Negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan orang dalam posisinya sebagai warganegara, bukan politikus ataupun pegawai negeri dan sifat partisipasi politik ini adalah sukarela, bukan dimobilisasi oleh Negara ataupun partai yang berkuasa.¹²

Terakhir menurut Keith Faulks partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif¹³. Dari beberapa pendapat ahli tersebut maka yang dimaksud partisipasi politik adalah adanya kegiatan atau keikutsertaan warga Negara dalam proses pemerintahan. Kemudian kegiatan tersebut diarahkan untuk memengaruhi jalannya pemerintahan. Sehingga dengan adanya partisipasi politik tersebut akan berpengaruh terhadap kehidupan mereka.

¹² Samuel P. Huntington Dan Joan Nelson, Partisipasi Politik Di Negara Berkembang, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), Hlm. 9-10

¹³ Keith Faulks. Sosiologi Politik, (Bandung: Nusa Media, 2010), Hlm.226

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi dua yaitu partisipasi aktif dan partisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menanti pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah.¹⁴ Sementara itu, Milbart dan Goel membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidaknya-tidak pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat.¹⁵

Pada umumnya partisipasi politik masyarakat ada yang bersifat mandiri (*autonomus*) dimana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri. Hal ini boleh jadi atas dasar rasa tanggung jawabnya dalam kehidupan politik, atau karena didorong oleh keinginan untuk mewujudkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya. Namun tidak jarang juga berpartisipasi yang dilakukan bukan karena kehendak individu yang bersangkutan, akan tetapi karena

¹⁴ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2007), Hlm.142

¹⁵ Ibid, hlm. 143

diminta atau digerakkan oleh orang lain dan bahkan dipaksa oleh kelompoknya. Partisipasi yang terakhir ini adalah partisipasi yang digerakkan atau sering disebut dengan *mobilized political participation*. Partisipasi politik masyarakat biasanya bersumber pada basis-basis sosial-politik tertentu. Kecuali partisipasi yang mengambil bentuk *contacting*, partisipasi pada umumnya merupakan sebuah tindakan kolektif.¹⁶

Landasan partisipasi politik adalah asal-usul individu atau kelompok yang melakukan kegiatan partisipasi politik. Huntington dan Nelson membagi landasan partisipasi politik ini menjadi:

1. Kelas, individu-individu dengan status sosial, pendapatan, dan pekerjaan yang serupa.
2. Kelompok atau komunal, individu-individu dengan asal-usul ras, agama, bahasa, atau etnis yang serupa.
3. Lingkungan, individu-individu yang jarak tempat tinggal atau domisilinya berdekatan.
4. Partai, individu-individu yang mengidentifikasikan diri dengan organisasi formal yang sama yang berusaha untuk meraih atau mempertahankan control atas bidang-bidang eksekutif dan legislatif pemerintahan, dan
5. Golongan atau faksi, individu-individu yang dipersatukan oleh interaksi yang terus menerus antara satu sama lain, yang

¹⁶ Afan Gaffar, "Merangsang Partisipasi Politik Rakyat", Dalam Syarofin Arba (Editor), *Demotologi Politik Indonesia: Mengusung Elitism Dalam Orde Baru*, (Jakarta: Pustaka Cidesindo, 1998), Hlm.241.

akhirnya membentuk hubungan patron-client, yang berlaku atas orang-orang dengan tingkat status sosial, pendidikan, dan ekonomi yang tidak sederajat.

2. Model Dan Bentuk Partisipasi Politik

Model partisipasi politik adalah tata cara orang melakukan partisipasi politik. Model ini terbagi kedalam 2 bagian besar: *Conventional* dan *Unconventional*. *Conventional* adalah model klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Model partisipasi politik ini sudah cukup lama ada, tepatnya sejak tahun 1940-an dan 1950-an. *Unconventional* adalah mode partisipasi politik yang tumbuh seiring munculkan Gerakan Sosial Baru (*New Social Movements*). Dalam gerakan sosial baru ini muncul gerakan pro lingkungan environmentalist, gerakan perempuan gelombang feminist, protes mahasiswa, dan teror

Jika model partisipasi politik bersumber pada faktor “kebiasaan” partisipasi politik di suatu zaman, maka bentuk partisipasi politik mengacu pada wujud nyata kegiatan politik tersebut. Samuel P. Huntington dan Joan Nelson membagi bentuk-bentuk partisipasi politik menjadi:

1. Kegiatan pemilihan, yaitu kegiatan pemberian suara dalam pemilihan umum, mencari dana partai, menjadi tim sukses, mencari dukungan bagi calon legislatif atau eksekutif, atau tindakan lain yang berusaha mempengaruhi hasil pemilu.

2. Lobby, yaitu upaya perorangan atau kelompok menghubungi pimpinan politik dengan maksud mempengaruhi keputusan mereka tentang suatu isu.
3. Kegiatan Organisasi, yaitu partisipasi individu ke dalam organisasi, baik selaku anggota maupun pemimpinnya, guna mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah.
4. Contacting, yaitu upaya individu atau kelompok dalam membangun jaringan dengan pejabat-pejabat pemerintah guna mempengaruhi keputusan mereka, dan
5. Tindakan kekerasan (*violence*), yaitu tindakan individu atau kelompok guna mempengaruhi keputusan pemerintah dengan cara menciptakan kerugian fisik manusia atau harta benda, termasuk di sini adalah huru-hara, terror, kudeta, pembunuhan politik (*assassination*), revolusi dan pemberontakan.

B. Perilaku Pemilih (Voting Behavior)

Perilaku pemilih dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik.¹⁷ Interaksi antara masyarakat dengan pemerintah, antara lembaga pemerintah dan antar kelompok masyarakat, dalam rangka proses pembuatan keputusan, kebijakan dalam bidang politik, pada dasarnya disebut dengan perilaku politik. Yang selalu melakukan kegiatan politik

¹⁷ Sujiono Sastroatmodjo, Drs. Perilaku Politik, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995, hal. 2

adalah pemerintah dan partai politik, karena fungsi mereka dalam bidang politik.

Keluarga, sebagai suatu kelompok melakukan kegiatan, termasuk di dalamnya adalah kegiatan politik. Dalam hal anggota keluarga secara bersamaan memberikan dukungan pada organisasi politik tertentu, memberikan iuran, ikut berkampanye menghadapi pemilu, maka dapat dikatakan keluarga tersebut telah melakukan kegiatan politik.¹⁸

Perilaku politik bukanlah merupakan sesuatu hal yang berdiri sendiri. Namun perilaku politik seseorang itu dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Faktor-faktor tersebut dapat berupa keadaan alam, kebudayaan masyarakat setempat, tingkat pendidikan dan lain-lain.

Berkaitan dengan perilaku politik, sesuatu yang perlu dibahas adalah sikap politik. Sikap mengandung tiga komponen yaitu, kognisi berkenaan dengan ide dan konsep, afeksi menyangkut kehidupan emosional, sedangkan konasi merupakan kecendrungan bertindak. Maka sikap politik dapat diartikan sebagai kesiapan untuk bereaksi terhadap objek tertentu yang bersifat politik, sebagai hasil penghayatan terhadap obyek tersebut, dengan munculnya sikap tersebut, maka dapat diperkirakan perilaku politik akan muncul juga.¹⁹

Yang berhak melakukan kegiatan politik adalah warga negara yang mempunyai jabatan di pemerintahan dan warga negara biasa. Dan yang

¹⁸ Ibid. Hal.21

¹⁹ Ibid. Hal.23

berhak membuat dan melaksanakan keputusan politik adalah pemerintah. Namun masyarakat dapat dan berhak ikut mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan tersebut, dan dengan adanya sikap tersebut maka masyarakat telah melakukan perilaku politik tersebut.

Dalam pelaksanaan pemilu di suatu Negara ataupun dalam pelaksanaan pilkada langsung di suatu daerah, perilaku politik dapat berupa perilaku masyarakat dalam menentukan sikap dan pilihan dalam pelaksanaan pemilu atau pilkada tersebut hal ini jugalah yang membuat digunakannya teori perilaku politik dalam proposal penelitian ini.

Perilaku politik dapat dibagi dua, yaitu: ²⁰

1. Perilaku politik lembaga-lembaga dan para pejabat pemerintah.
2. Perilaku politik warga Negara biasa (baik individu maupun kelompok) Yang pertama bertanggung jawab membuat, melaksanakan dan menegakkan keputusan politik, sedangkan yang kedua berhak mempengaruhi pihak yang pertama dalam melaksanakan fungsinya karena apa yang dilakukan pihak pertama menyangkut kehidupan pihak kedua. Kegiatan politik yang dilakukan oleh warga Negara biasa (individu maupun kelompok) disebut partisipasi politik.

²⁰ Ramlan Surbakti, Memahami Ilmu Politik, Jakarta : Grasindo. 1999 hal 15-16

Ada 4 (empat) faktor yang mempengaruhi perilaku politik aktor politik (pemimpin, aktivis, dan warga biasa) yaitu :²¹

1. Lingkungan sosial politik tak langsung seperti sistem politik, ekonomi, budaya dan media massa.
2. Lingkungan sosial politik langsung yang membentuk kepribadian aktor seperti keluarga, agama, sekolah, dan kelompok bergaul. Dari lingkungan ini, seorang aktor politik mengalami proses sosialisasi dan internalisasi nilai dan norma masyarakat dan norma kehidupan bernegara.
3. Struktur kepribadian. Hal ini tercermin dalam sikap individu (yang berbasis pada kepentingan, penyesuaian diri dan eksternalisasi).
4. Lingkungan sosial politik langsung berupa situasi yaitu keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung ketika hendak melakukan suatu kegiatan seperti cuaca, keadaan keluarga, keadaan ruang, kehadiran orang lain, suasana kelompok, dan ancaman dengan segala bentuknya.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi perilaku pemilih. Misalnya saja isu-isu dan kebijakan politik, tetapi ada pula sekelompok orang yang memilih kandidat karena dianggap representasi dari agama atau keyakinannya. sementara kelompok lainnya memilih kandidat politik tertentu karena dianggap representasi dari kelas sosialnya bahkan ada

²¹ Ramlan Surbakti, Ibid.,hal 132

juga kelompok yang memilih sebagai ekspresi dari sikap loyal pada ketokohan figur tertentu. Sehingga yang paling mendasar dalam mempengaruhi perilaku pemilih antara lain pengaruh elite, identifikasi kepartaian, sistem sosial, media massa dan aliran politik. Ada tiga model pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan sosiologis, pendekatan psikologis, dan pendekatan Pilihan rasional. Akan tetapi pada fenomena ini, penulis lebih berfokus kepada pendekatan psikologis.

1. Pendekatan Psikologis

Psikologis adalah ilmu sifat, dimana fungsi-fungsi dan fenomena pikiran manusia dipelajari. Setiap tingkah laku dan aktivitas masyarakat dipengaruhi oleh akal individu. Sedangkan ilmu politik mempelajari aspek tingkah laku masyarakat umum sehingga ilmu politik berhubungan sangat dekat dengan psikologi²².

Pendekatan ini muncul merupakan reaksi atau ketidakpuasan mereka terhadap pendekatan sosiologis. Secara metodologis, pendekatan sosiologis dianggap sulit diukur, seperti bagaimana mengukur secara tepat sejumlah indikator kelas sosial, tingkat pendidikan, agama dan sebagainya. Pendekatan ini menggunakan dan mengembangkan konsep psikologi terutama konsep sikap dan sosialisasi untuk memperjelas perilaku pemilih. Disini para pemilih menentukan pilihannya karena pengaruh kekuatan psikologis yang berkembang dalam dirinya sebagai

²² Dikutip dari Sulhardi, *Political Psychology Socialization and Culture*, <http://pangerankatak.blogspot.com/2008/04/governing-intoduction-to-political>, diakses pada tanggal 4 April 2016

produk dari proses sosialisasi, artinya sikap seseorang merupakan refleksi dari kepribadian dan merupakan variable yang menentukan dalam mempengaruhi perilaku politiknya. Pendekatan psikologis menganggap sikap sebagai variable utama dalam menjelaskan perilaku politik. Hal ini disebabkan oleh fungsi sikap itu sendiri, menurut Greenstein ada 3 yakni:²³

1. Sikap merupakan fungsi kepentingan, artinya penilaian terhadap objek diberikan berdasarkan motivasi, minat dan kepentingan orang tersebut.
2. Sikap merupakan fungsi penyesuaian diri, artinya seseorang bersikap tertentu sesuai dengan keinginan orang itu untuk sama atau tidak sama dengan tokoh yang disegani atau kelompok panutan.
3. Sikap merupakan fungsi eksternalisasi dan pertahanan diri, artinya sikap seseorang itu merupakan upaya untuk mengatasi konflik batin atau tekanan psikis yang mungkin berwujud mekanisme pertahanan dan eksternalisasi diri.

Namun sikap bukanlah sesuatu hal yang cepat terjadi, tetapi terbentuk melalui proses yang panjang, yakni mulai dari lahir sampai dewasa. Pada tahap pertama, informasi pembentukan sikap berkembang dari masa anak-anak. Pada fase ini, keluarga merupakan tempat proses belajar. Anak-anak belajar dari orangtua menganggap isu politik dan

²³ Ibid

sebagainya. Pada tahap kedua, adalah bagaimana sikap politik dibentuk pada saat dewasa ketika menghadapi situasi di luar keluarga. Tahap ketiga, bagaimana sikap politik dibentuk oleh kelompok-kelompok acuan seperti pekerjaan, gereja, partai politik dan asosiasi lain.

Melalui proses sosialisasi ini individu dapat mengenali sistem politik yang kemudian menentukan sifat persepsi politiknya serta reaksinya terhadap gejala-gejala politik di dalam kaitannya dengan pemilihan kepala daerah. Sosialisasi bertujuan meningkatkan kualitas pemilih.

C. Kepercayaan Politik

Kepercayaan individu kepada pihak lain merupakan dasar untuk individu tersebut menunjukkan sikap dan perilakunya kepada individu lainnya. Teori-teori psikologi menggolongkan keadaan seperti ini disebut *trust*. Menurut Rousseau et al, kepercayaan adalah wilayah psikologis yang memperhatikan penerimaan apa adanya berdasarkan harapan terhadap perilaku orang lain.²⁴

Perilaku seseorang akan sejalan dengan sikap yang dimiliki oleh individu terhadap suatu hal. Dijelaskan oleh Ajzen (1975) di dalam teori perencanaan pembejaraan, bahwa intension yang terdiri dari faktor sosial dan individual membentuk sikap yang dimanifestasikan dalam bentuk perilaku. Intension tersebut berakar pada kepercayaan individu terhadap sesuatu.

²⁴ Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., & Camerer, C. (1998). Not so different after all: A cross-discipline view of trust. *Academy of Management Review*, 23, 393-404.

Trust diperlukan dalam hubungan individu satu dengan lainnya untuk berbagai konteks kehidupan. Suatu konteks dimana individu melakukan evaluasi pada pemerintahan dalam bentuk norma masyarakat atau nilai-nilai yang diharapkan di dalam aturan administratif disebut sebagai *political trust*.²⁵ *Trust* dianggap sebagai hal yang esensial didalam dukungan politik pada suatu pemerintahan.

Ada empat tipe *political trust* menurut Christensen dan Laegreid, antara lain :²⁶

1. Tingginya *political trust* (sistem politik dan kinerja pemerintah), mengindikasikan tingginya sebaran dukungan dan dukungan yang spesifik dengan saling menguatkan antar satu dengan yang lain.
2. Tingkat kepercayaan pada sistem pemerintahan yang lebih tinggi dari pada kinerja pemerintahan mengindikasikan tingginya sebaran dukungan dan rendahnya dukungan yang spesifik.
3. Tingkat kepercayaan pada kinerja pemerintahan lebih tinggi dari pada sistem politik mengindikasikan tingginya dukungan yang spesifik dan rendahnya sebaran dukungan.
4. Tingkat kepercayaan yang rendah pada sistem politik dan kinerja pemerintahan mengindikasikan rendahnya sebaran dukungan yang spesifik pada kasus krisis legitimasi.

²⁵ Miller, Arthur H. (1974). Political Issues and Trust in Government: 1964-1970. American Political Science Review, 68(3): 951-72.

²⁶ Cristensen, Tom and Per Laegreid. (2005) Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography. Public Performance and Management Review, 28(4) : 487-511.

Keterkaitan antara sistem politik yang ada dengan kinerja pemerintahan saat itu mempengaruhi bagaimana sebaran dukungan serta dukungan spesifik yang diberikan oleh individu-individu di dalam suatu tatanan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada institusi pemerintah itu sendiri, partai politik serta figur politik juga merasakan bagaimana masyarakat memandang keterlibatan mereka. Indonesia yang dikenal dengan nusantara memiliki beragam wilayah, beragam masyarakat dengan ragam kebutuhan individunya pula. Dukungan politik yang dikaitkan dengan kepercayaan individu secara langsung akan menjadi tidak stabil antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Dukungan dari individu-individu tersebut akan disesuaikan dengan tatanan pemerintahan yang sedang berjalan. Hal ini menjadi besar frekuensinya dalam menentukan sikap individu terhadap politik di wilayah tersebut.

Political trust dihubungkan dengan harapan harapan normatif pada tokoh dan institusi politik, di mana kepuasan dipandang sebagai sikap terhadap hasil kebijakan yang ada. Ini berarti, intensi untuk mempercayai sistem pemerintahan akan disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat itu sendiri. Sehingga individu akan cenderung mempertimbangkan aspek-aspek kognitif di dalam mengambil sikap terhadap kinerja pemerintahan.

Budaya yang terbentuk pada suatu wilayah akan mempengaruhi sikap individu pada kebijakan dan kinerja pemerintahan di sana. Budaya telah membentuk individu dalam menegakkan nilai-nilai untuk

kehidupannya. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lianjiang Li (2004) di negaranya (Cina) menunjukkan perbedaan penilaian berdasarkan daerah tempat tinggal dan bentuk pemerintahan (antara pemerintah pusat pemerintah pada masing-masing daerah).

Penilaian yang merupakan sebuah sikap di dalam perilaku yang ditunjukkan individu didasarkan pada *trust* yang dibentuk individu tersebut terhadap pemerintahan yang ada. Ini membentuk sebuah sirkulasi antara sikap dan institusi dan tokoh politik sebagai pihak yang menjalankan pemerintahan dengan sikap individu-individu di masyarakat yang melakukan penilaian. Sehingga bentuk perilaku yang tercermin dari sirkulasi sikap tersebut menghasilkan suatu bentuk *political trust* pada suatu wilayah.

Menurut Lewicki, ada 3 (tiga) dimensi trust, yaitu :²⁷

1. *Ability*.

Dikaitkan dengan penampilan individu berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan kompetensi untuk dipercaya oleh individu yang lain.

2. *Integrity*.

Tingkat kesesuaian prinsip individu di dalam mempercayai orang lain.

²⁷Lewicki, Roy J. (1995). "Trust in Relationship: A Model of Development and Decline". In Conflict, Cooperation and Justice: Essays Inspired by the work of Morton Deutsch. Edited by Deutsch, Morton, ed. San Francisco: Jossey-Bass.

3. *Benevolence*.

Seberapa besar individu percaya kepada orang lain untuk berperilaku baik kepadanya.

Dimensi *trust* dapat dijadikan landasan dalam melihat tingkat kepercayaan individu di dalam konteks penilaian mereka terhadap pemerintahan. Ketiganya akan diuraikan satu persatu sebagai suatu sikap dan perilaku individu tersebut. Pertama, institusi dan tokoh politik di dalam sistem pemerintahan akan dinilai oleh masyarakat berdasarkan kemampuan (*ability*) yang mereka miliki sehingga membentuk kepercayaan individu. Kedua, nilai-nilai yang diharapkan oleh masyarakat menjadi besar pengaruhnya didalam kepercayaan terhadap sistem pemerintahan yang dikaitkan dengan norma institusi atau tokoh politik yang ada di sana. Dan terakhir, kepercayaan yang diberikan oleh individu dalam menilai suatu pemerintahan didasari oleh perilaku yang ditunjukkan dari pemerintah dalam meyakinkan masyarakat.

Satu hal yang menjadi penting di dalam *political trust* ialah keyakinan individu terhadap sistem pemerintahan untuk kemudian menilainya. Sehingga, terdapat tiga bentuk dampak dari *political trust*, yaitu kepercayaan pada pemerintah, sinisme politik, dan kepercayaan incumbent.²⁸ Ketiganya tidak terjadi secara bersamaan, namun dapat saling mendukung. Dan sesuatu yang mendasar dalam memahami

²⁸Schiffman, Leon dkk. (2007). Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens trust. European Journal; of Marketing.

konsep *political trust* adalah perbedaannya dengan *trust in politic*. Ini diartikan sebagai kepercayaan yang dibangun di dalam dunia politik.

D. Kerangka Pikir

Sejak ditetapkan Undang-Undang no. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, baik Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, maupun Walikota atau Wakil Walikota, dipilih secara langsung oleh rakyat. Pilkada secara langsung memberi kesempatan yang lebih luas kepada masyarakat untuk terlibat di dalam berbagai proses politik. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang juga menyatakan bahwa calon independen dalam pilkada diperbolehkan ikut berkontestasi dalam pemilihan umum.

Dengan berlakunya UU nomo 32 tahun 2004 tentang pemilihan kepala daerah secara langsung, membuka jalan kepada masyarakat untuk memilih calon pemimpinnya sesuai dengan keinginan. Calon independen pun memiliki hak yang sama di dalam pemilihan umum, pasangan calon independen ini bersaing dengan pasangan calon yang diusung oleh partai politik. Dalam pemilu, masyarakat diberikan sebuah pilihan yakni, memilih calon dari partai politik, calon dari jalur independen atau bahkan tidak memilih sama sekali (golput). Partisipasi masyarakat bagi calon yang akan bertarung di dalam pemilihan umum sangat dibutuhkan.

Perilaku pemilih dapat dirumuskan sebagai kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan

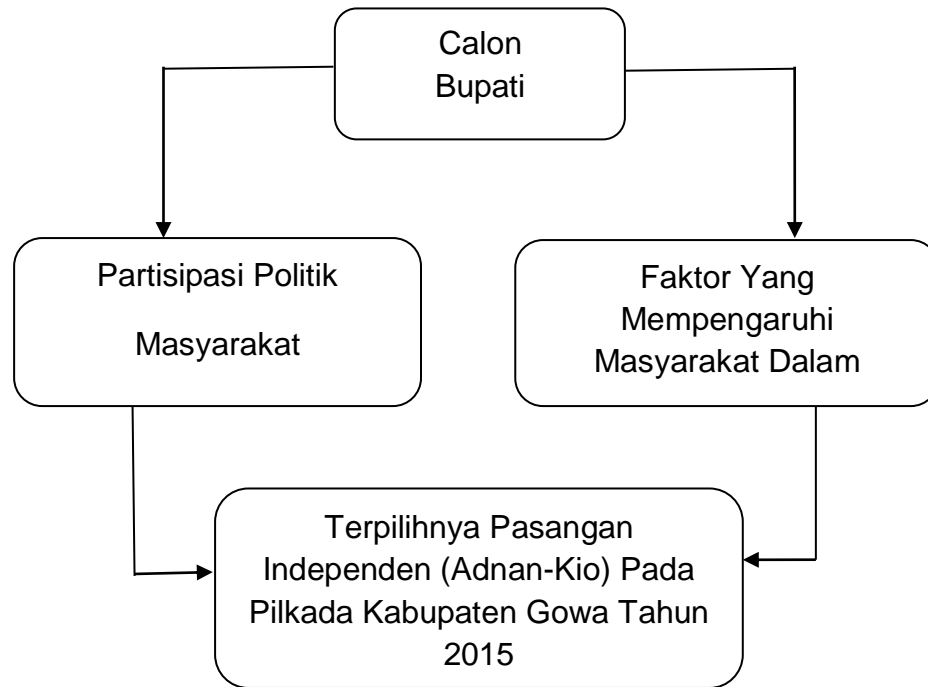
politik²⁹. Pemilih yang berarti masyarakat, dalam menentukan pilihannya cenderung dipengaruhi oleh kepercayaan politik, yang di mana kepercayaan politik itu sendiri dianggap sebagai hal yang esensial didalam dukungan politik bagi pasangan calon.

Seperti yang terjadi pada pemilihan kepala daerah di kabupaten gowa, yang mana diikuti oleh lima pasangan calon, tiga diantaranya merupakan pasangan yang diusung oleh partai politik, dan dua pasang lainnya maju melalui jalur independen. Pada pemilihan tersebut Adnan-Kio keluar sebagai pemenang, di mana pasangan Adnan-Kio sendiri merupakan pasangan yang maju melalui jalur independen. Pada fenomena ini menggambarkan bahwa masyarakat memberikan kepercayaannya terhadap calon independen.

Membentuk kepercayaan politik dalam hal menentukan pilihan dapat dilihat berbagai faktor. Dalam kerangka pemikiran ini penulis ingin menggambarkan bagaimana pilihan pemilih dibentuk oleh berbagai faktor yang akan berpengaruh dalam pilkada kabupaten gowa tahun 2015. Penulis beranggapan bahwa kemenangan pasangan Adnan-Kio pada pilkada kabupaten gowa tahun 2015 tidak terlepas dari beberapa faktor dan juga partisipasi masyarakat.

²⁹ Sujiono Sastroatmodjo, Drs. Perilaku Politik, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995, hal. 2

Skema Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

Pembahasan ini akan dijelaskan lima aspek, yang pertama yaitu lokasi penelitian, kedua tipe dan dasar penelitian, ketiga, sumber data, keempat teknik pengumpulan data, kelima teknik analisis data.

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Gowa yang merupakan salah satu Kabupaten yang ada di Sulawesi Selatan yang baru saja melaksanakan pilkada serentak tahun 2015. Hal yang menjadi pertimbangan memilih Kabupaten Gowa sebagai fokus penelitian adalah kondisi masyarakat di Gowa yang memiliki karakter yang beragam. Karakter masyarakat di Kabupaten Gowa bagian dekat dengan kota memiliki pemahaman terhadap politik, lebih terbuka dan lebih memahami perkembangan politik yang terjadi. Sementara itu masyarakat bagian pinggiran kota baik di daerah dataran tinggi maupun di daerah pesisir pantai, lebih cenderung tertutup serta kurang memahami perkembangan politik yang terjadi, serta pertimbangan bahwa Kabupaten Gowa merupakan salah satu kabupaten yang mengikuti pilkada serentak yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia, dan di dalam pilkada Kabupaten Gowa diikuti oleh 2 (dua) pasang calon Independen yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati, dan juga karena dinamika politik di dalam pilkada Kabupaten Gowa sangat tinggi dimana dalam pilkada Kabupaten Gowa ini yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah

merupakan anak dari petahana yang juga harus melawan tantenya sendiri. Selain itu juga terdapat calon kembali ikut bertarung untuk ketiga kalinya dalam pilkada Kabupaten Gowa ini tetapi tetap gagal meraih kemenangan, inilah yang membuat peneliti menjadi tertarik melakukan penelitian. Dan penelitian ini akan difokuskan di Kecamatan Bajeng dan Kecamatan Somba Opu. Berikut adalah hasil rekapitulasi suara yang ada di kecamatan Bajeng dan Somba Opu:

1. Kecamatan Bajeng. Pasangan Adnan-Kio memperoleh suara sebanyak 15.476 suara (42,76%) dari 36.188 total suara.
2. Kecamatan Somba Opu. Pasangan Adnan-Kio memperoleh suara sebanyak 20.829 suara (33, 54%) dari 62.099 total suara.

Pertimbangan peneliti memilih kecamatan bajeng sebagai lokus penelitian dikarenakan pada kecamatan ini pasangan Adnan-Kio menang telak dari 4 pasang calon lainnya. Peneliti juga memilih kecamatan Somba Opu, dengan pertimbangan pada kecamatan ini terdapat 62.099 suara, yang merupakan daerah dengan jumlah suara terbanyak.

B. Tipe dan Dasar Penelitian

Tipe dan dasar penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif analisis dengan dasar penelitian lapangan, yaitu penelitian yang di arahkan untuk menggambarkan fakta dan argumen yang tepat. Metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat

serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif, tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami (*to understand*) fenomena atau gejala sosial dengan lebih menitik beratkan pada gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji daripada rincinya menjadi variabel-variabel yang saling terkait untuk menghasilkan temuan atau kebenaran yang mendalam sehingga menghasilkan temuan data yang real sesuai dengan fakta yang terdapat di lapangan serta bersumber dari berbagai faktor yang mempengaruhi data tersebut yang sesuai dengan konteks kebenaran.

C. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh melalui studi lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Penulis memperoleh pendapat atau opini tentang keterlibatan komunitas-komunitas dalam pelaksanaan pilkada dan bagaimana tanggapan dalam menyikapi permasalahan tersebut, melalui komunikasi langsung dengan para informan. Peneliti terlibat langsung mengumpulkan data, seperti rekaman hasil wawancara, serta foto kegiatan selama di lapangan. Data primer merupakan data yang didapat selama di lapangan di Kabupaten Gowa, sehingga nantinya penulis berharap akan mendapatkan data tentang penelitian ini.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan cara membaca buku, literatur-literatur, serta informasi tertulis lainnya yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Selain itu terdapat situs-situs atau website yang dapat diakses untuk memperoleh data yang lebih akurat. Data sekunder dimaksudkan sebagai data-data penunjang untuk melengkapi penelitian yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penelitian atau pengumpulan data yang direncanakan untuk digunakan dilapangan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara(*interview*)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, yang dilakukan oleh pewawancara yang mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban. penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara yang dilakukan terhadap sejumlah informan. Penulis secara langsung melakukan wawancara dengan informan yang dianggap paham dan mengetahui dengan jelas masalah yang diteliti. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang tidak terstruktur. Karena teknik tersebut memberikan ruang yang lebih luas dibandingkan dengan tipe-tipe wawancara yang lain. Teknik ini digunakan untuk memahami kompleksitas sumber informan yang dapat membatasi

kekayaan data yang akan diperoleh. Informan yang terpilih sebagai berikut:

1. Muh. Fitriadi, S.Ip
2. Abd. Aziz (31 Tahun)
3. Nasrullah (42 Tahun)
4. Kamaruddin Dg. Tompo (63 Tahun)
5. Syamsiah (46 Tahun)
6. Drs. H. Azis (7 Tahun)
7. Sisgon (38 Tahun)
8. Anwar (50 Tahun)
9. H. Tutu (68 Tahun)
10. Saharuddin Dg. Sikki (37 Tahun)

2. Studi Pustaka dan Dokumen

Cara pengumpulan data yang dilakukan berhubungan dengan penelitian. Teknik ini digunakan untuk menunjang data primer atau data utama yang diperoleh dari informan mengenai Pilkada Gowa 2015. Penulis melakukan analisis data dan interpretasi data sesuai dengan langkah-langkah yang dijabarkan pada bagian metode analisis data di akhir bab ini. Penulis lalu membuat kesimpulan dan memberikan saran-saran untuk penelitian selanjutnya

E. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh akan di analisis dengan menggunakan teknik analisa data kualitatif. Analisis data adalah proses penyederhanaan dalam

bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak awal sampai sepanjang proses penelitian berlangsung. Data dari hasil wawancara yang diperoleh kemudian dicatat dan dikumpulkan sehingga menjadi sebuah catatan lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses analisa data ada tiga yaitu, pertama reduksi data pada proses ini data yang telah diperoleh di lapangan kemudian dikurangi untuk diambil data-data yang pentingnya saja yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Reduksi data bisa dilakukan dengan jalan melakukan abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat rangkuman yang inti, proses dan pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada dalam data penelitian. Selanjutnya adalah penyajian data sekaigus tahap verifikasi pada tahapan ini data-data penting yang telah diambil kemudian disajikan sekaligus dilakukan pengecekan ulang terhadap data yang telah dipilih tersebut untuk kemudian disajikannya dalam pembahasan permasalahan dalam penelitian ini.

Kemudian yang terakhir pengambilan kesimpulan. Pada tahapan ini penulis mengambil data yang paling penting yang telah disajikan dalam pembahasan permasalahan penelitian. Kesimpulan atau verifikasi adalah tahap akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. PROFIL SINGKAT KABUPATEN GOWA

Kabupaten gowa berada pada 119.37773° Bujur Barat dan 120.0317° Bujur Timur, 5.0829342862° Lintang Utara dan 5.577305437° Lintang Selatan. Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah otonom ini, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.³⁰

Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 167 desa/kelurahan dengan luas sekitar 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 72,26%. Ada 9 wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu Parangloe, Manuju, Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,50% mempunyai kemiringan tanah di atas 40°, yaitu pada wilayah kecamatan parangloe, Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak sungai yang cukup besar yaitu ada

³⁰ Dapat dilihat pada www.gowakab.go.id di akses pada tanggal 26 juli 2016

15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran yang terbesar adalah sungai jeneberang yaitu seluas 881 km² dengan panjang 90 km.

Tabel 1.
Banyaknya Desa, Kelurahan, Lingkungan, Dusun, Rw/Rk, Rt Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa, 2010-2014

Kecamatan		Desa/ Kelurahan	Lingkungan /Dusun	RK/ RW	RT
Bontonompo		14	50	116	215
Bontonompo Selatan		9	41	72	151
Bajeng		14	62	131	347
Bajeng Barat		7	32	68	168
Pallangga		16	60	163	392
Barombong		7	30	78	159
Somba Opu		14	28	102	369
Bontomarannu		9	25	64	139
Pattallassang		8	36	71	158
Parangloe		7	20	49	106
Manuju		7	28	57	113
Tinggimoncong		7	24	64	163
Tombolo Pao		9	49	100	229
Parigi		5	20	56	109
Bungaya		7	32	64	154
Bontolempangan		8	29	65	114
Tompobulu		8	43	94	217
Biringbulu		11	66	132	227
Jumlah	2014	167	675	1.546	3.530
	2013	167	675	1.546	3.530
	2012	167	675	1.546	3.286
	2011	167	675	1.546	3.286
	2010	167	675	1.546	3.286

Sumber: Kabupaten Gowa Dalam Angka 2015

Tabel 2.
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin di
Kabupaten Gowa, 2010-2014

Kecamatan <i>District</i>		Jenis Kelamin Sex			Rasio Jenis Kelami n Sex Ratio
		Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	Jumlah <i>Total</i>	
Bontonompo		19.650	21.488	41.138	91
Bontonompo Selatan		14.141	15.312	29.453	92
Bajeng		33.037	33.838	66.875	98
Bajeng Barat		11.832	12.464	24.296	95
Pallangga		55.997	57.420	113.417	98
Barombong		18.726	19.207	37.933	97
Somba Opu		75.577	76.339	151.916	99
Bontomarannu		16.796	17.062	33.858	98
Pattallassang		11.699	11.715	23.414	100
Parangloe		8.709	9.125	17.834	95
Manuju		7.129	7.599	14.728	94
Tinggimoncong		11.572	11.794	23.366	98
Tombolo Pao		14.465	14.039	28.504	103
Parigi		6.071	6.811	12.882	89
Bungaya		7.815	8.403	16.218	93
Bontolempangan		6.016	6.682	12.698	90
Tompobulu		13.916	14.937	28.853	93
Biringbulu		15.558	16.446	32.003	95
Jumlah	2014	348.706	360.680	709.386	97
	2013	339.575	351.734	691.309	97
	2012	329.673	340.792	670.465	97
	2011	324.021	335.492	659.513	97
	2010	320.793	332.148	352.941	97

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa (tahun 2010, Hasil Sensus penduduk 2010).

Source : BPS Statistic of Gowa Regency

Visi Kabupaten Gowa

Terwujudnya Gowa yang Handal dalam Peningkatan Kualitas Hidup Masyarakat.

Misi Kabupaten Gowa

1. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia dengan moral dan akhlak yang tinggi serta keterampilan yang memadai.
2. Meningkatkan interkoinersitas wilayah dan keterkaitan ekonomi.
3. Meningkatkan kelembagaan dan peran masyarakat.
4. Meningkatkan penerapan hukum dan penerapan prinsip tata pemerintahan yang baik
5. Mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang mengacu pada kelestarian lingkungan.

Gambar 3.
Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Gowa



Sumber: Peta google map Kabupaten Gowa

B. PROFIL SINGKAT KECAMATAN SOMBA OPU

Kecamatan somba opu merupakan daerah dataran yang berbatasan Sebelah Utara Kota Makassar. Sebelah Selatan Kecamatan Pallangga. Sebelah Barat Kecamatan Pallangga dan Kota Makassar, sedangkan di Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bontomarannu. Dengan jumlah Kelurahan sebanyak 14 (empat belas) kelurahan dan dibentuk berdasarkan PERDA No. 7 Tahun 2005. Ibukota Kecamatan Somba Opu adalah kelurahan Sungguminasa.³¹

Jumlah penduduk kecamatan Somba Opu sebesar 151.916 jiwa yang terdiri dari laki-laki sebesar 75.577 jiwa dan perempuan sebesar 76.339 jiwa.

Beberapa fasilitas umum yang terdapat di Kecamatan Somba Opu seperti sarana pendidikan antara lain Taman Kanak-Kanak sebanyak 60

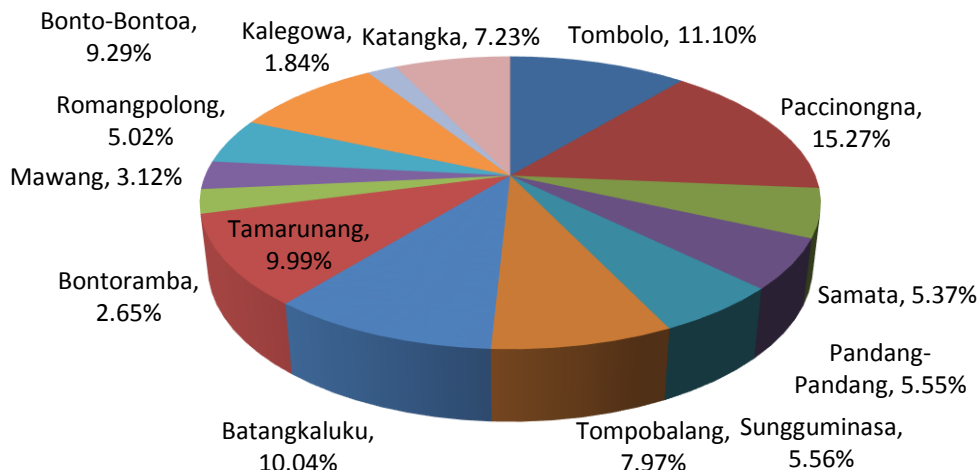
³¹ Dapat dilihat pada www.gowakab.go.id diakses pada tanggal 26 juli 2016

buah, Kelompok Belajar sebanyak 28 buah, Tempat Penitipan Anak sebanyak 3 buah, SPAS sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Negeri sebanyak 14 buah, Sekolah Dasar Inpres sebanyak 28 buah, Sekolah dasar Swasta sebanyak 6 buah, SDLB sebanyak 1 buah, Sekolah Lanjutan Pertama Negeri sebanyak 5 buah, Sekolah Lanjutan Pertama Swasta sebanyak 12 buah, Sekolah Menengah Umum Negeri sebanyak 3 buah, Sekolah Menengah Umum swasta sebanyak 10 buah, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebanyak 2 buah, Sekolah Kejuruan Swasta sebanyak 6 buah, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 2 buah, Madrasah Tsanawiyah sebanyak 6 buah, Madrasah Aliyah sebanyak 5 buah, Universitas 1 buah.

Disamping itu terdapat beberapa sarana kesehatan, seperti Rumah Sakit 1 buah, Puskesmas 2 buah, Rumah Bersalin 6 buah, Poliklinik 5 buah, Pustu 3 buah, Praktek Dokter 18, Posyandu 71 buah dan Apotik 35 buah. Ada juga tempat ibadah Masjid 142 buah, Surau/Mushola 22 buah, Gereja 4 buah dan pasar.

Gambar 4.

Persentase Penduduk Kecamatan Somba Opu Menurut Kelurahan Tahun 2014



Sumber : Kecamatan Somba Opu Dalam Angka 2015

Tabel 3.
Kepadatan Penduduk Di Kecamatan Somba Opu Tahun 2012-2014

No.	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Orang)	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (Orang/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Pandang-Pandang	8.429	2,16	3.902
2.	Sungguminasa	8.450	1,46	5.788
3.	Tompobalang	12.106	1,80	6.726
4.	Batangkaluku	15.245	1,30	11.727
5.	Tamarunang	15.183	2,16	7.029
6.	Bontoramba	4.031	2,12	1.901
7.	Mawang	4.738	2,99	1.585
8.	Romangpolong	7.632	2,71	2.816
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9.	Bonto-Bontoa	14.108	1,61	8.763
10.	Kalegowa	2.790	1,21	2.306
11.	Katangka	10.981	1,36	8.074
12.	Tombolo	16.864	2,06	8.186
13.	Pacinongan	23.204	3,71	6.254
14.	Samata	8.155	1,44	5.663
Jumlah	2014	151.916	28,09	5.408
	2013	137.942	28,09	4.911
	2012	133.784	28,09	4.763

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Gambar 5.
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Somba Opu



Sumber: Peta google map Kecamatan Somba Opu

C. Profil Singkat Kecamatan Bajeng

Kecamatan Bajeng merupakan salah satu bagian wilayah dari Kabupaten Gowa yang terletak di sebelah Utara Sungguminasa yang merupakan Ibukota Kabupaten Gowa. Dari segi geografis Kecamatan Bajeng terdiri dari dataran dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:³²

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Pallangga
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Takalar
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Bontonompo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Bajeng Barat

Koordinat dan ketinggian letak kantor Desa/Kelurahan, desa yang paling jauh dari permukaan laut adalah Desa Bone sedangkan Desa yang paling dekat dengan laut adalah Desa Maccini Baji.

³² Dapat dilihat pada www.gowakab.go.id diakses pada tanggal 26 juli 2016

1. Luas Wilayah

Kecamatan Bajeng merupakan wilayah dataran yang memiliki wilayah seluas 60,09 km² atau 3,19% dari luas wilayah daratan Kabupaten Gowa. Kecamatan Bajeng mempunyai 14 wilayah Desa/Kelurahan dengan desa terluas adalah Desa Pabentengang dengan luas wilayah 8,89 km² atau 14,79% dari luas Kecamatan Bajeng. Untuk desa yang terkecil adalah Kelurahan Mataallo dengan luas wilayah 2,5 km² atau 1,22% dari luas Kecamatan Bajeng.

Akses dari Ibukota kecamatan keseluruhan Desa/Kelurahan di wilayah Kecamatan Bajeng relatif mudah, karena semua Desa/Kelurahan dapat dilewati dengan kendaraan roda empat maupun roda dua.

2. Pemerintahan

Wilayah administrasi Kecamatan Bajeng dengan Ibukota Kecamatan adalah Kelurahan Kalebajeng, terdiri dari 14 Desa/Kelurahan, 10 Desa dengan status hukum Desa adalah Desa Definitif dan 4 Kelurahan.

Dalam setiap desa di Kecamatan Bajeng telah terbentuk antara 3 sampai 8 Dusun/Lingkungan, dimana untuk setiap Dusun terdiri dari lebih dari 6-16Rw/Rk, 14-48Rt.

Dalam setiap desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng telah dilengkapi dengan aparat desa/kelurahan, mulai sekretaris Desa (Sekdes)/Sekertaris Lurah (Seklur) sampai dengan Kepala Urusan (Kaur). Dalam menjalankan tugas sehari-hari semua desa/kelurahan telah memiliki Kantor. Untuk

sarana dan prasarana lainnya seperti Balai Desa/Kelurahan dan sanggar PKK hampir semua desa/kelurahan telah ada.

Pada Tahun 2014 jumlah prasarana pertahanan sipil desa/kelurahan di Kecamatan Bajeng berjumlah 109 buah. Sedangkan jumlah personil pertahanan sipil berjumlah 184 orang.

3. Penduduk

Penduduk merupakan salah satu topik yang terkait dengan pembangunan Nasional. Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat dominan, karena penduduk tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga menjadi sasaran pembangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan, perkembangan penduduk diarahkan pada pengendalian kuantitas, pengendalian kualitas, serta pengarahan mobilitas sehingga mempunyai ciri dan karakteristik yang menguntungkan pembangunan.

Pada tahun 2014 secara terus-menerus perkembangan penduduk di kecamatan Bajeng terus meningkat. Komponen utama yang mempengaruhi perkembangan penduduk di kecamatan Bajeng adalah kelahiran, kematian dan migrasi.

Penduduk terbanyak di kecamatan Bajeng berada di Desa Panciro 6.699 jiwa, sedangkan menurut kepadatan penduduk kelurahan Mataallo terbesar 3.048 jiwa per kilometer persegi.

Jumlah rumah tangga dalam tahun 2014 mencapai 15.841 Rumah tangga dengan rata-rata anggota rumah tangga 4 orang setiap rumah.

tangga. Peningkatan jumlah rumah tangga tersebut disamping oleh adanya perubahan status perkawinan penduduk juga disebabkan oleh adanya tambahan penduduk melalui migrasi antar daerah/provinsi.

Hingga tahun 2014 penduduk perempuan mencapai 33.838 jiwa dan penduduk laki-laki mencapai 33.037 jiwa. Rasio jenis kelamin tahun 2014 adalah 98. Rasio terbesar berada di Desa Lempagang dan Tubajeng yaitu sebesar 100 sedangkan yang terkecil berada di kelurahan Limbung yaitu 93.

Persebaran penduduk kecamatan Bajeng dengan jumlah penduduk sebanyak 66.875 jiwa, tercatat penduduk terbanyak berada di Desa Panciro sebanyak 6.669 jiwa, sedangkan jumlah penduduk terkecil berada di kelurahan Tubajeng sebanyak 2.908 jiwa.

4. Tenaga Kerja

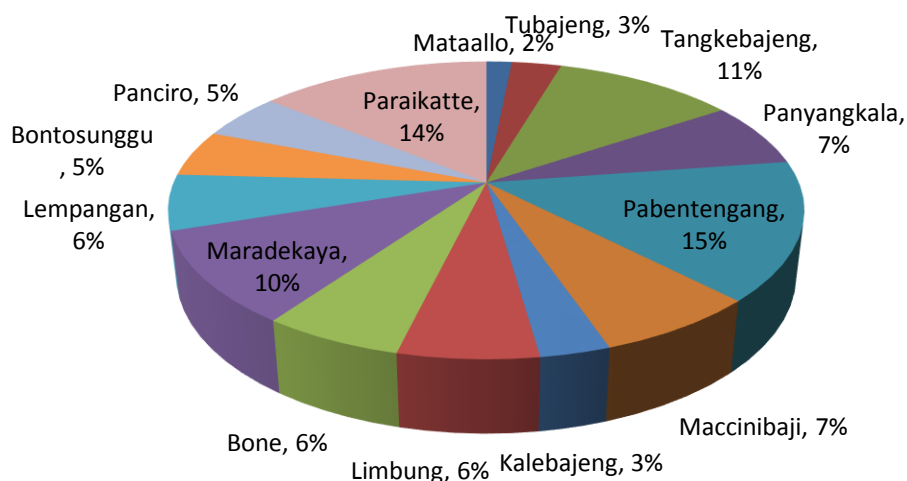
Ketenaga kerjaan merupakan aspek yang amat mendasar dalam kehidupan manusia karena mencakup dimensi ekonomi dan sosial. Setiap upaya pembangunan kemudian selalu diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan berusaha sehingga penduduk dapat memperoleh manfaat langsung dari pembangunan.

Perkembangan ketenaga kerjaan di kecamatan Bajeng dapat dilihat dari besarnya keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk dalam pasar kerja, yaitu penduduk yang bekerja dan mencari pekerjaan, disebut sebagai tingkat partisipasi angkatan kerja. Banyaknya

penduduk yang masuk dalam pasar kerja menunjukkan jumlah penduduk yang siap terlibat dalam kegiatan ekonomi. Selain itu perkembangan ketenagakerjaan dapat dilihat dari angka pengangguran terbuka, lapangan pekerjaan, dan status pekerjaan.

Sumber mata pencaharian utama penduduk di Kecamatan Bajeng adalah mayoritas di sektor pertanian. Adapun produk unggulan pada sektor tanaman pertanian yaitu tanaman padi.

Gambar 6.
Persentase Luas Wilayah Kecamatan Bajeng Menurut Desa/Kelurahan



Sumber : Desa/Kelurahan

Tabel 4.
Luas, Jumlah Penduduk dan Kepadatan Menurut Desa/Kelurahan

No	Desa/Kelurahan	Km ²	Penduduk	Kepadatan Penduduk Per Km ²
1	Tangkebajeng	6.35	3.620	570
2	Panyangkalang	4.25	5.188	1.221
3	Pabenteng	8.89	5.204	585
4	Maccinibaji	4.32	4.513	1.045
5	Kalebajeng	1.80	4.317	2.398
6	Limbung	3.50	4.928	1.408
7	Bone	3.58	5.592	1.562
8	Maradekaya	5.80	5.784	997

9	Lempangang	3.57	3.631	1.017
10	Bontosunggu	3.18	6.565	2.064
11	Panciro	3.18	6.699	2.107
12	Paraikatte	8.24	3.263	396
13	Mataallo	1.53	4.663	3.048
14	Tubajeng	1.90	2.908	1.531
KECAMATAN BAJENG		60.09	66.875	1.113

Sumber : BPS Kabupaten Gowa

Gambar 7.
Peta Wilayah Administrasi Kecamatan Bajeng



Sumber: Peta google map Kecamatan Bajeng

D. Pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Gowa

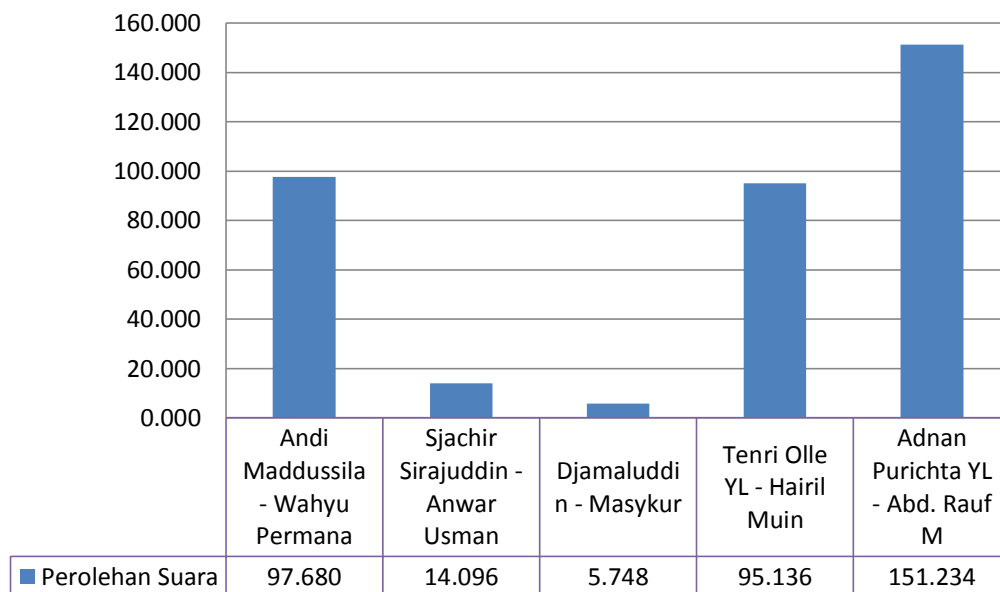
Sebanyak 11 (sebelas) daerah tingkat kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pilkada serentak tahun 2015 untuk mencari bupati dan wakil bupati terpilih. Sebelas daerah ini yaitu: Selayar, Bulukmba, Gowa, Maros, Pangkep, Soppeng, Tana Toraja, Toraja Utara, Luwu dan Luwu Timur.

Pada Pilkada kabupaten Gowa, dalam pilkada tersebut diikuti oleh 5 pasang calon bupati dan wakil bupati, dimana 3 pasang diantaranya diusung oleh partai politik, yakni pasangan Drs. Andi Maddusila Andi Idjo dan Wahyu Permana Kaharuddin, S.E. pasangan ini didukung oleh Partai Demokrat, Partai Hanura, PKS dan PKB. Pasangan Drs. H. Sjachrir Sjarifuddin Dg. Jarung dan Ir. H. M. Anwar Usman. Pasangan didukung oleh Partai Golkar. Pasangan Hj. Tenri Olle Yasin Limpo, S.H, M.Si dan H. Hairil Muin, M.Si. pasangan ini didukung oleh Partai Nasdem dan PPP. Sementara itu 2 pasang lainnya yang melalui jalur independen, yakni pasangan Ir. Djamaluddin Maknun, M.P dan Dr. H. Masjkur, S.P, M.Si serta pasangan Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.si.

Dari 544.795 jumlah DPT di Kabupaten Gowa, yang menggunakan hak suaranya sebanyak 357.988 suara atau (65.71%), yang tidak menggunakan hak sebanyak 186.807 suara atau (34.29%). Adapun hasil perolehan suara pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 dapat kita lihat pada gambar 6 berikut ini.³³

Gambar 8.
Grafik perolehan suara Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015

³³ Dapat dilihat di <https://pilkada2015.kpu.go.id/gowakab> diakses pada tanggal 10 Maret 2016



sumber: KPUD Kabupaten Gowa

Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 diikuti oleh lima pasang calon. Dua pasang diantaranya maju melalui jalur independen, kehadiran calon independen dalam pilkada kabupaten gowa bukan pertama kalinya terjadi, karena pada pilkada 2010 juga terdapat calon melalui jalur independen. Yang membedakan antara pilkada 2010 dan 2015 ialah, pada pilkada kabupaten gowa tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan yang maju melalui jalur independen

Keadaan di lapangan ditemukan bahwa dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gowa pada tahun 2015, pemilih tidak berorientasi kepada jalur yang digunakan oleh kandidat baik partai politik maupun independen bukan menjadi masalah bagi pemilih. Pemilih di Kabupaten Gowa lebih cenderung berorientasi kepada kandidat pasangan calon atau figur. Ditemukan juga di lapangan bahwa, dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagian besar partisipasi politik

masyarakat tergolong partisipasi politik aktif namun pragmatis, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis baik dari internal ataupun eksternal dari pemilih

Kemenangan pasangan Independen (Adnan-Kio) pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, tidak terlepas dari berbagai faktor, yang pertama yakni aktor politik dibalik kemenangan pasangan independen Adnan-Kio, yakni Ichsan Yasin Limpo, yang juga merupakan ayah dari Adnan Purichta, dimana Ichsan Yasin Limpo Sendiri merupakan Bupati Kabupaten Gowa dua periode dan masih menjabat ketika Pilkada tahun 2015 berlangsung. Yang kedua ialah Pasangan ini juga memanfaatkan kekuatan birokrasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa, dan ini bukanlah hal yang sulit bagi pasangan ini, karena kita ketahui bersama bahwa yang menjadi bupati pada saat itu ialah Ichsan Yasin Limpo. Dan yang terakhir, ditemukan di lapangan bahwa adanya mobilisasi massa pemilih dalam pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai

proses politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidaklah hanya berarti warga mendukung keputusan atau kebijakan para pemimpinnya, partisipasi politik masyarakat idealnya berdasarkan kesadaran politik masyarakatnya, karena partisipasi politik masyarakat akan berdampak pada kehidupan mereka.

Selama ini demokrasi dipahami sebagai bentuk pemilihan secara langsung untuk mengisi jabatan publik atau politik. Secara umum dalam pengisian jabatan kepala daerah menggunakan dua jalur, pertama adalah melalui jalur partai politik dan jalur kedua melalui calon independen atau yang biasa di sebut jalur perseorangan. Mencermati keberadaan calon independen, maka sejak keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam *judicial review* terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yang menyatakan bahwa calon independen dalam pilkada diperbolehkan menimbulkan optimisme baru dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Hadirnya calon Independen dalam pemilihan kepala daerah bisa menjadi alternatif pilihan bagi masyarakat selain calon yang melalui jalur partai politik. Kehadiran calon independen memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut dalam pencalonan kepala daerah tanpa melalui jalur partai. Kehadiran calon independen merupakan

interpretasi dari kurang percayanya masyarakat dengan pencalonan kepala daerah yang melalui jalur partai politik.

Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 diikuti oleh lima pasang calon. Dua pasang diantaranya maju melalui jalur independen, kehadiran calon independen dalam pilkada kabupaten gowa bukan pertama kalinya terjadi, karena pada pilkada 2010 juga terdapat calon melalui jalur independen. Yang membedakan antara pilkada 2010 dan 2015 ialah, pada pilkada kabupaten gowa tahun 2015 dimenangkan oleh pasangan yang maju melalui jalur independen. Berdasarkan fenomena tersebut, maka penulis melakukan penelitian untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang partisipasi masyarakat dengan adanya calon independen pada pilkada 2015 kabupaten gowa, dan juga faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam mendukung calon independen, yang akan diuraikan dalam sub bab selanjutnya.

A. Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Memilih Calon Independen

Sub bab ini menjelaskan tentang partisipasi politik masyarakat di kabupaten gowa khususnya di kecamatan Somba Opu dan di kecamatan Bajeng, serta membahas tentang partisipasi masyarakat dengan adanya calon independen pada pilkada 2015 kabupaten gowa.

Pemilihan kepala daerah di kabupaten gowa diikuti oleh lima pasangan calon, dimana dua pasang di antaranya maju melalui jalur independen. Sejak Mahkamah Konstitusi menganulir judicial review terhadap pasal 59 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang

pemerintahan daerah yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan kepala daerah, mengisyaratkan bahwa dibukanya calon perseorangan (independen) dalam pemilihan kepala daerah tidak hanya bagi unsur partai atau kandidat calon yang diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat serta ketentuan pencalonan saja yang boleh ikut dalam kontestasi pemilihan umum kepala daerah namun, kandidat calon independen pun bisa ikut dalam pertarungan *electoral* di tingkat lokal ini dengan memenuhi syarat minimum pencalonan yang telah ditentukan. Munculnya calon independen ini merupakan kesempatan secara luas bagi masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses pemilihan kepala daerah. Peran rakyat dalam rekrutmen politik diharapkan bisa ditingkatkan. Seperti hadirnya calon independen yang merupakan wujud dari kekecewaan terhadap pencalonan melalui jalur partai politik.

Kehadiran calon independen merupakan wujud partisipasi politik masyarakat dengan menggunakan jalur yang disediakan oleh Negara, menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dinyatakan Bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Pemilihan secara langsung merupakan gambaran bahwa rakyatlah yang bertanggung jawab dalam menentukan pemimpin yang akan diberikan tanggung jawab.

Masyarakat yang menganut sistem politik demokrasi, seperti halnya Indonesia, semestinya masyarakatnya turut aktif dalam partisipasi politik. Hal ini dikarenakan dalam sistem politik demokrasi, rakyatlah yang harus berdaulat. Maka, proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan-keputusan politik, lebih-lebih yang menyangkut hajat hidup orang banyak, rakyat harus ikut aktif terlibat di dalamnya. Seperti dalam wawancara penulis dengan Bapak Anwar ³⁴ yang mengatakan:

“Saya tetap ikut, karena kita kan sebagai warga Negara kan harus salurkan hak pilihnya, mau bagaimana pun bentuknya. Tapi kan pendapat (alasan) semua orang berbeda...”³⁵

Keikutsertaan masyarakat dalam sistem pemilu tentunya memiliki alasannya masing-masing, mulai karena kesadaran politik masyarakat, atau karena merupakan bagian dari tim sukses salah satu pasangan yang bertarung ataupun karena mengharapkan suatu imbalan dan lain sebagainya. Jika kesadaran politik masyarakat sudah tinggi seperti yang dikatakan oleh informan diatas, maka tingkat partisipasinya pun akan tinggi. Tetapi jika melihat hasil Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015, tingkat partisipasi masyarakat cenderung menurun jika di bandingkan dengan Pilkada Kabupaten Gowa sebelumnya. Rendahnya partisipasi politik pada Pilkada Kabupaten Gowa jika di bandingkan dengan pilkada sebelumnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.
Partisipasi Pemilih masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2005, 2010, dan 2015

³⁴ Anwar warga Kecamatan Somba Opu

³⁵ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2016

No	Pemilihan Umum Kabupaten Gowa	Jumlah Pemilih	Yang Menggunakan Hak (Partisipasi Pemilih)			
			LK	PR	JML	%
1	Pilkada 2005	377.031	145.452	162.603	308.055	81.71%
2	Pilkada 2010	447.690	156.330	178.130	334.460	74.71%
3	Pilkada 2015	544.795	166.470	191.518	357.988	65.71%

Sumber: KPUD Gowa

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi rendahnya partisipasi politik masyarakat. Seperti pada tabel yang diatas, partisipasi pemilih di Kabupaten Gowa mengalami penurunan di setiap pelaksanaan pilkada. Kurangnya sosialisasi dan kesiapan panitia pelaksana pemilu juga bisa menjadi faktor dalam rendahnya partisipasi masyarakat, seperti yang di katakan oleh Bapak Sisgon³⁶ kepada penulis, bahwa :

“Saya tidak ikut memilih, karena saya tidak mendapat undangan, saya juga heran kenapa saya tidak dapat undangan memilih, na saya ini warga gowa..”³⁷

Hal yang senada juga di sampaikan oleh Bapak Drs. H. Aziz³⁸ yang mengatakan, bahwa:

“Saya ini tidak dapat undangan memilih, bahkan anak dan istri saya juga tidak dapat undangan, tapi saya tetap pergi memilih karena itu kewajiban saya sebagai warga Negara Indonesia”³⁹

Salah satu faktor penyebab rendahnya partisipasi politik dalam momentum pemilu karena adanya pemahaman bahwa memilih adalah

³⁶ Sisgon warga Kecamatan Somba Opu

³⁷ Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2016

³⁸ Drs. H. Azis warga Kecamatan Somba Opu

³⁹ Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2016

sebuah hak dan bukan kewajiban. Karena memilih adalah sebuah hak dan bukan kewajiban maka pemilih bisa menggunakan dan bisa juga tidak menggunakan karena tidak ada konsekuensi hukum dan moral politik bagi mereka yang tidak memilih. Faktor lain yang menyebabkan rendahnya partisipasi politik karena masyarakat terjebak dalam rutinitas ekonomi membuat pilihan politik bukan menjadi prioritas sehingga mempengaruhi cara pandang mereka terhadap politik, dan masih banyak faktor lainnya.

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung oleh rakyat di Kabupaten Gowa merupakan mekanisme yang digunakan dalam memilih kepala daerah di Kabupaten Gowa. Jalur Independen sebagai wadah bagi masyarakat yang tidak memiliki dukungan dari partai, dipilih sebagai salah satu alternatif bagi calon untuk menduduki kursi nomor satu khususnya di Kabupaten Gowa.

Perilaku politik individu dikatakan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan salah satunya adalah keadaan alam⁴⁰. Kabupaten Gowa merupakan wilayah yang terbagi atas dataran tinggi dan dataran rendah. Kecamatan Bajeng merupakan lokasi penelitian yang dipilih oleh penulis melihat bahwa wilayah kecamatan Bajeng termasuk wilayah yang memiliki dataran tinggi dan rendah, sehingga mampu memberikan gambaran tentang perilaku politik masyarakatnya. Hasil wawancara penulis dengan Muh. Fitriadi, S.Ip⁴¹, memberikan pernyataan yang dianggap mampu

⁴⁰ Sujiono Sastroatmodjo, Drs. Perilaku Politik, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995, hal. 2

⁴¹ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kab. Gowa)

menjabarkan perilaku politik masyarakat kecamatan Bajeng, yang mengatakan:

“Di gowa ini terbagi 2 wilayah, dataran rendah dan tinggi...pelosok-pelosok merupakan dataran tinggi....Kalau disini (Bajeng) kan bukan kota,Bajeng (terletak) di pinggiran kota, Bajeng juga terbagi, yang di poros (Limbung) dan di pelosok-pelosok, gaya memilih mereka (masyarakat) juga berbeda, kalau yang ada di kota (Poros/Limbung) sudah banyak pemilih cerdas, sedangkan di pelosok-pelosok itu masih sangat kurang sekali yang di kategorikan pemilih-pemilih cerdas, sehingga gaya memilih mereka berbeda...”⁴²

Keadaan pemilih di Kabupaten Gowa khususnya Kecamatan Bajeng terbagi atas dua kategori yakni, pemilih cerdas dan pemilih konvensional. Pemilih cerdas merupakan pemilih yang umunya berdomisili di perkotaan, sedangkan dikatakan bahwa pemilih konvensional adalah masyarakat yang berdomisili di pelosok kecamatan Bajeng. Hal ini membenarkan mengenai bahwa, perilaku politik seseorang itu dipengaruhi faktor-faktor internal dan eksternal yang berasal dari lingkungan sekitarnya, baik keadaan alam, keluarga, pendidikan dan sebagainya.⁴³ Muh. Fitriadi, S.Ip⁴⁴, menambahkan :

“...Pemilih cerdas itu insiatif, antisipatif dan protektif, serta selektif dalam menentukan pilihannya, mereka menggunakan pemikiran jangka panjang. Karena mereka sadar bahwa pilihannya akan berdampak terhadap daerahnya. Sedangkan pemilih konvensional itu yang ada di pelosok-pelosok mereka memilih karena ada sesuatu, mereka di janji sehingga mereka memilih, tapi dimana-mana kita harus mengakui karena tingkat kecerdasan masyarakat yang ada di pelosok itu minim, belum lagi dikaitkan dengan agama masih sangat minim, sehingga

⁴² Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

⁴³ Sujiono Sastroatmodjo, Drs. Perilaku Politik, Semarang : IKIP Semarang Press, 1995, hal. 2

⁴⁴ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

mereka menganggap segala sesuatunya itu uanglah segalanya.... Jadi tingkat partisipasi pemilih itu juga dipengaruhi oleh itu tadi, dan gayanya itu ada yang memang inisiatif dan betul-betul selektif, ada juga memang karena dibujuk. Istilahnya dijanji kemudian dia datang, belum lagi dijanji dengan sesuatu yang lebih bagus atau misalkan adanya politik uang, sehingga mereka datang, seperti itu...”⁴⁵

Jika menggunakan konsep perilaku memilih dari Eep Saifullah,⁴⁶ bahwa pemilih cerdas yang dimaksudkan oleh informan merupakan pemilih rasional, yang berarti pemilih di Kecamatan Bajeng khususnya yang berada di kota, lebih menggunakan pertimbangan rasional dalam menentukan pilihannya, dengan pertimbangan kalkulatif dan rasionalitas dalam memilih. Sedangkan pemilih konvensional yang berada di kecamatan Bajeng yang dimaksud oleh informan di atas, termasuk pemilih pragmatis, hal ini dikarenakan pemilih cenderung melihat untung dan rugi sesaat yang diperolehnya ketika memilih salah satu calon seperti yang digambarkan oleh informan seperti *money politic*, sehingga hal tersebut menjadi salah satu penentu partisipasi politik dari masyarakat di Kabupaten Gowa.

Kurangnya pengetahuan politik masyarakat di kabupaten gowa membuat mereka pragmatis dalam menentukan pilihannya. *Money politik* dalam pilkada atau pemilu biasanya berupa pemberian uang dan materi lainnya kepada calon pemilih dengan harapan pemilih tersebut memberikan dukungan atau memilih calon atau pihak yang memberikan uang. Dalam hal ini politik uang dianggap sebagai pelanggaran karena

⁴⁵ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

⁴⁶ Eep Saifullah Fatah dalam Efriza *Political Explorer*, 2012, hal.487.

memberikan uang sebagai bentuk upaya untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih. Masyarakat tidak memperdulikan lagi pelanggaran mengenai politik uang, karena masyarakat lebih memilih calon yang memberikan keuntungan, masyarakat ikut dalam pemilihan juga dikarenakan mendapat imbalan, dan cenderung masyarakat tidak memikirkan tentang jalur yang digunakan oleh calon bupati maupun wakil bupati.

Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 juga dapat dijadikan tolak ukur, bahwa calon independen “menjual” kepribadian mereka dalam menghadapi Pilkada. Masyarakat dalam hal ini sebagai sasaran dari calon bupati dan wakil bupati yang bersaing, merupakan individu yang akan menggunakan hak pilihnya dalam pilkada, tentunya akan memiliki kriteria dalam memilih salah satu calon, dan salah satunya adalah kepribadian dari sang calon bupati maupun wakil bupati. Nasrullah⁴⁷ sebagai salah satu pemilih dalam pilkada Kabupaten Gowa memberikan pernyataannya, sebagai berikut:

*“Saya pikir semua sama saja, mau lewat partai atau tidak. Karena kita kan lebih melihat sosoknya, jadi dia mau partai atau tidak, saya pikir tidak ada bedanya”.*⁴⁸

Nasrullah sebagai masyarakat yang memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan, melihat bahwa aktor merupakan hal yang paling penting dalam sebuah pencalonan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Nasrullah, juga menunjukkan partai pengusung menjadi hal yang

⁴⁷ Nasrullah warga Kecamatan Bajeng

⁴⁸ Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016

kurang diperhatikan oleh masyarakat, karena mereka cenderung melihat sosok dari calon itu sendiri.

Bagi Masyarakat Kabupaten Gowa, kehadiran calon melalui jalur independen bukan menjadi sebuah hal yang harus diperdebatkan. Syamsiah⁴⁹ sebagai pemilih dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 memberikan gambaran perilaku politiknya dalam melihat calon pasangan bupati-wakil bupati pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015, Syamsiah tidak berorientasi kepada partai pengusung maupun jalur yang digunakan oleh pasangan calon, Syamsiah tidak mempermasalahkan jalur yang digunakan oleh calon pasangan, Syamsiah menuturkan:

“Samaji kayaknya (Jalur Parpol atau Indepeden), karena persoalan itu saya tidak terlalu tauji juga. Waktu pemilihan pun saya hanya mengikuti apa yang disuruhkan sama suamiku, saya juga tidak terlalu tau apakah yang saya pilih itu melalui jalur independen atau jalur partai”.

Secara umum, partisipasi politik masyarakat ada yang bersifat mandiri (*autonomus*) dimana individu dalam melakukan kegiatannya atas dasar inisiatif dan keinginan sendiri.⁵⁰ Berdasarkan konsep partisipasi politik dan wawancara dengan informan di atas, terlihat bahwa perilaku politik informan tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor keluarga. Tergambarkan bahwa, persepsi politik dari informan terbentuk akibat dari adanya sosialisasi yang dilakukan oleh suami kepada informan, sehingga sosialisasi politik yang dilakukan oleh suami mendapatkan reaksi dari informan dalam bentuk ikut memilih sesuai dengan sosialisasi yang

⁴⁹ Syamsiah pemilih Kecamatan Bajeng

⁵⁰ Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016

dilakukan oleh suami. Dalam pengertian tersebut dapat dilihat juga, bahwa pengetahuan Informan mengenai Calon dengan Jalur Partai maupun Independen merupakan gambaran reaksi dari kurangnya sosialisasi dari suami kepada informan tentang calon dengan jalur independen maupun partai politik, sehingga informan terkesan kurang memahami mengenai calon-calon yang bertarung dalam pilkada kabupaten gowa dan hanya sekedar mengikuti atau ikut menggunakan hak pilihnya.

Pilkada di kabupaten gowa, tergambarkan bahwa masyarakat tidak melihat apakah calon itu maju melalui jalur independen ataukah melalui jalur partai, seperti yang di katakan oleh Muh. Fitriadi, S.Ip⁵¹ dalam wawancara besama penulis, beliau mengatakan bahwa:

“...masyarakat kita di gowa itu masih lebih dominan, masyarakat yang kita kategorikan masuk pemilih yang masih lebih banyak belum cerdas, pemilih biasa. Jadi mereka itu tidak melihat dia mau independen atau partai, mereka tidak lihat, mereka melihat itu sosoknya, yang lebih banyak berperan itu figurnya. Misalkan kasus korupsi, kalau pemilih biasa dia tidak pusingi itu, tapi kalau pemilih cerdas yang nonton atau baca berita, pasti dia bilang dari partai anu itu, partai korupsi dan lain-lain. Tapi saya kira itu kecil pengaruhnya, lebih banyak itu kepada pribadinya, sosoknya, apa yang dijanjikan, apa yang diberikan, cash atau berbicara nanti, itu yang paling dia lihat masyarakat saya kira. Jadi baik independen maupun partai, masyarakat itu tidak melihat...”.⁵²

Citra diri menjadi sangat penting dalam mencapai sukses baik dalam upaya mempengaruhi publik maupun dalam melaksanakan peran peran politik. Figur seorang calon sangat mempengaruhi pilihan

⁵¹ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

⁵² Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

masyarakat. Masyarakat lebih melihat kepribadian calon bupati dan wakil bupati yang melalui jalur partai politik maupun jalur independen, dan mengesampingkan visi dan misi yang digunakan oleh calon, sehingga cenderung tergambarkan bahwa masyarakat lebih dipengaruhi oleh persona dari aktor dibandingkan visi dan misi yang dipertarungkan dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.

Pemilihan Kabupaten Gowa pada tahun 2015 memberikan gambaran bahwa pemilih bukan berorientasi kepada jalur yang digunakan oleh kandidat baik partai politik maupun independen bukan menjadi masalah bagi pemilih. Pemilih di Kabupaten Gowa lebih cenderung berorientasi kepada kandidat pasangan calon atau figur. Ditemukan dilapangan bahwa, dalam Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa tahun 2015 sebagian besar partisipasi politik masyarakat tergolong partisipasi politik aktif namun pragmatis, hal tersebut lebih dipengaruhi oleh faktor psikologis baik dari internal ataupun eksternal dari pemilih. Pragmatisme jangka pendek pemilih cenderung terbentuk akibat kurang kritis terhadap isu-isu serta adanya kompensasi instan yang ditawarkan oleh kandidat. Selebar uang, sebungkus sembako dan berbagai praktik lainnya mereka rasakan sudah cukup untuk menukar suara mereka.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Masyarakat Dalam Memilih Calon Independen

Adnan-Kio merupakan pasangan pemenang pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, dengan perolehan hasil suara sebanyak 41,56% atau 151,234 suara. Pada sub bab sebelumnya telah

tergambarkan bahwa partisipasi politik masyarakat pada pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 yang tergolong partisipasi politik aktif yang didominasi oleh pemilih pragmatis. Menjadi hal menarik ketika masyarakat sebagai pemilih tidak berorientasi pada jalur yang digunakan oleh pasangan calon Bupati-Wakil Bupati. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan, faktor apa yang menyebabkan masyarakat tetap mendukung pasangan independen dalam memenangkan Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015, dan faktor tersebut akan diruaikan dalam sub bab ini.

Adapun penulis menemukan faktor-faktor yang mendukung kemenangan pasangan independen dalam hal ini Adnan-Kio pada pilkada kabupaten gowa 2015, yakni (1) Figur Ichsan Yasin Limpo, (2) Pemanfaatan Birokrasi (3) Mobilisasi Massa dalam memilih. Hal tersebut akan di uraikan lebih lanjut dalam sub bab selanjutnya.

1. Figur Ichsan Yasin Limpo

Pemilihan kepala daerah langsung memunculkan fenomena baru, yakni politik kekerabatan. Mahkamah Konstitusi (MK) telah memutuskan bahwa, keluarga petahana tetap bisa ikut mencalonkan dalam pilkada. Di sejumlah daerah, ada keluarga yang mendominasi pimpinan daerah. Ketika sang Bupati habis masa jabatannya, dia digantikan oleh istri/suami atau anak mereka, dan hal tersebut dipilih secara demokratis. Menurut catatan Kementerian Dalam Negeri, hingga tahun 2014, terdapat 59 kepala daerah/wakil kepala daerah yang memiliki ikatan keluarga dengan petahana. Dalam upaya melanggengkan kekuasaan para kerabat itu,

terbuka kemungkinan pemanfaatan sumber daya dan pengaruh dari tokoh yang masih menggenggam kekuasaan. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Gowa, ketika Bupati lama selesai menjabat digantikan oleh anaknya, yakni Adnan Purichta Yasin Limpo.

Adnan Purichta Yasin Limpo (selanjutnya disebut Adnan) merupakan anak dari Ichsan Yasin Limpo. Ichsan Yasin Limpo (IYL) merupakan bupati Gowa dua periode 2005-2010 dan 2010-2015. Ichsan Yasin Limpo juga merupakan adik kandung dari Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yasin Limpo.

Wawancara penulis dengan beberapa informan menemukan bahwa aktor politik merupakan faktor yang mendukung kemenangan pasangan independen dalam hal ini Adnan-Kio pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015. Menurut Laswell, aktor mencakup individu pemegang kekuasaan dalam suatu bangunan politik. Aktor mencapai kedudukan dominan dalam sistem politik dan kehidupan masyarakat. Mereka memiliki kekuasaan, kekayaan dan kehormatan. Dalam penulisan ini, Aktor politik yang penulis maksud adalah Ichsan Yasin Limpo.

Ichsan Yasin Limpo sebagai aktor politik memiliki kekuasaan yang mampu mempengaruhi partisipasi politik masyarakat gowa dalam Pilkada Tahun 2015. seperti dalam kemenangan pasangan Adnan-Kio dalam Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015. Ichsan Yasin Limpo merupakan kekuatan politik yang membantu kemenangan Adnan Purichta Yasin Limpo dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Pengaruh Ichsan

Yasin Limpo dalam membentuk pola tindakan masyarakat dalam memilih pada Pilkada Kabupaten Gowa 2015 terbilang cukup besar. Peran Ichsan Yasin Limpo dapat dilihat dari seberapa besar pengaruhnya dalam mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Gowa. Pengaruh ini dapat berasal dari figur atau ketokohan dari aktor politik maupun jaringan politik yang telah dibentuk, sehingga secara psikologis kepercayaan politik masyarakat terbentuk kepada keluarga dari Yasin Limpo, Seperti hasil wawancara penulis dengan bapak Abd. Azis⁵³. Yang mengatakan:

“saya memilih Pak Adnan, karena itu istri dari wakilnya Pak Adnan itu orang limbungji juga toh, makanya saya pilih dia, selain itu juga kan karena Pak Adnan ini juga merupakan anak dari mantan Bupati sebelumnya”.⁵⁴

Figur seorang Ichsan Yasin Limpo memiliki pengaruh pada pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015, seperti yang tergambarkan dalam wawancara penulis dengan informan diatas yang terlihat bahwa masyarakat dipengaruhi oleh sosok Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa. Kepercayaan politik masyarakat terhadap *clan* Yasin Limpo khususnya di Kabupaten Gowa tergambarkan dari wawancara di atas, sehingga terjabarkan pula bahwa ketika Ichsan Yasin Limpo memimpin, Ichsan Yasin Limpo mampu menanamkan kepada masyarakat bahwa dia mampu untuk dipercaya sebagai pemimpin mereka. Hal ini juga

⁵³ Abd. Azis warga Kecamatan Bajeng

⁵⁴ Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016

disampaikan oleh Nasrullah dari wawancara penulis. Nasrullah⁵⁵ mengatakan:

*“Kalau yang saya pilih itu, bupati terpilih sekaranag Pak Adnan, saya pilih Pak Adnan itu karena yang pertama karena saya lihat dia masih muda, otomatis mungkin pembangunan bisa dengan mudah di laksanakan dengan cepat karena dia masih muda dan dia berpengalaman, yang kedua karena dia masih anaknya mantan bupati sebelumnya, karena masih keturunan keluarga (yasin limpo)...”*⁵⁶

Selain figur Adnan sebagai seorang calon bupati yang masih muda, fakta bahwa Adnan merupakan anak dari Ichsan Yasin Limpo yang pada saat itu sebagai bupati terlihat jelas mempengaruhi pemilih dalam menentukan pilihannya, dan juga terlihat informan diatas masih memandang keturunan keluarga yasin limpo dalam menentukan pilihannya. Disisi lain, *clan* Yasin Limpo juga sangat mempengaruhi partisipasi politik masyarakat Gowa.

Dengan jabatannya juga sebagai Bupati Kabupaten Gowa, memberikan kemudahan bagi Ichsan Yasin Limpo untuk menggunakan pengaruhnya agar masyarakat memilih Adnan-Kio dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 dan pengaruh tersebut sebagai salah satu faktor yang membantu memenangkan Adnan-Kio dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Dengan “embel-embel” Yasin Limpo, Adnan mampu membuat masyarakat Gowa memberikan kepercayaan kepadanya, seperti halnya Ichsan dengan “embel-embel” Yasin Limponya.

⁵⁵ Nasrullah warga Kecamatan Bajeng

⁵⁶ Wawancara pada tanggal 2 Agustus 2016

Hal ini juga dapat tergambarkan dengan wawancara penulis dengan Bapak Anwar⁵⁷ yang mengatakan, bahwa:

“...Karena dia (pemilih) sudah taumi bahwa ini (Adnan YL) yang akan menang nanti kalau maju. Orang-orang sudah umum ini, bahwa percuma kau lawan dinasti (Yasin Limpo), selama dia (Syahrul YL) masih kosong satu Sulsel, palingan nanti (Adnan YL) masih menjabat 10 tahun lagi....itulah hebatnya keluarga Yasin Limpo.”⁵⁸

Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati kabupaten Gowa dua periode (periode 2005-2010 dan 2010-2015) yang juga merupakan ayah dari Adnan dan *clan* Yasin Limpo yang membuat masyarakat menjatuhkan pilihan kepada Adnan Purichta Yasin Limpo pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Kepercayaan politik masyarakat terhadap kekuatan politik yang dimiliki oleh *clan* Yasin Limpo membuat mereka cenderung menjadi pemilih yang tergolong pragmatis, masyarakat menganggap bahwa siapa pun yang akan terpilih, tidak akan merubah keadaan apapun. Pemikiran masyarakat juga sudah terkonstruksi bahwa, melawan dinasti politik merupakan hal yang sia-sia dan hanya membuang tenaga. Dan di sisi lain, rendahnya kepercayaan politik masyarakat terhadap mekanisme politik yang berlangsung, membuat masyarakat kurang tertarik terkait masalah-masalah politik.

2. Pemanfaatan Birokrasi

Penelitian juga menemukan salah satu faktor yang membantu kemenangan Adnan-Kio dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten

⁵⁷ Anwar warga Kecamatan Somba Opu

⁵⁸ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2016

Gowa Tahun 2015, adalah pemanfaatan Birokrasi, yang akan diuraikan lebih lanjut dalam sub bab ini.

Sejak penyelenggaraan pemilihan kepala daerah secara langsung baik gubernur dan bupati/ walikota yang dipilih langsung oleh rakyat, selalu menjadi ajang pertarungan oleh para calon pasangan beserta tim pemenangannya untuk meraup suara sebesar besarnya. Selain partai politik dan tim pemenangannya sebagai mesin pengumpul suara, maka berbagai simpul sipil digerakkan demi meraih suara. Komunitas, kelompok bahkan organisasi massa dan keagamaan lainnya pun tidak segan-segan memberikan dukungan untuk calon pasangan tertentu. Bahkan PNS/ASN dijadikan sebagai lumbung suara riil pada setiap perhelatan pilkada. Sementara PNS sebagai aparatur negara yang idealnya tidak terlibat mendukung pun terjebak oleh arus politik praktis demi suatu jabatan atau takut untuk ditempatkan pada posisi tanpa jabatan (*non job*).

Meskipun dalam pemilihan Ichsan Yasin Limpo tidak lagi maju dalam pilkada, namun kuasa yang dimiliki dapat memberikan kekuatan untuk melakukan politisasi birokrasi. Ketika terjadi perubahan kekuasaan dari satu Bupati ke Bupati yang lain, telah menjadi hal lumrah ketika pejabat yang mengisi struktur di birokrasi juga mengalami perubahan. Hal tersebut menjadi ketakutan dari oknum PNS, pemutasian yang selama ini terjadi cenderung bukan dikarenakan hasil kerja PNS yang buruk, melainkan karena PNS tersebut dianggap tidak memilih Bupati terpilih

ketika masa Pilkada dan oknum PNS tersebut dianggap sebagai musuh politiknya. Hal tersebut juga terjadi pada birokrasi Kabupaten Gowa, sehingga birokrasi cenderung tunduk kepada pilihan Bupati pada saat pilkada. Wawancara penulis dengan Saharuddin Dg. Sikki⁵⁹ juga sedikit menggambarkan hal yang serupa dengan penjelasan diatas, yang mengatakan bahwa:

“...Kalau di Bajeng ini, masyarakat takut kalau bicara seperti ini, apalagi kalau PNS, saya yakin mereka tidak mau, karena bisa saja mereka dimutasi ke pegunungan. Jadi masyarakat disini itu ditekan untuk memilih. kalau ditahu ada PNS yang tidak mendukung, tunggu saja bakal di lempar ke pegunungan.”⁶⁰

Intervensi Bupati dalam pilkada Kabupaten Gowa dapat tergambarkan dari hasil wawancara di atas, Intervensi yang dilakukan oleh Bupati membuat netralitas PNS menjadi diragukan, keberadaan PNS seharusnya tetap berada pada pelayanan publik, kekhawatiran ketika PNS berpihak kepada salah satu calon, akan terjadi PNS yang menjadi pelayan penguasa, karena ketakutan akan mutasi pejabat struktural. Hal ini senada dengan yang disampaikan oleh Bolgherini mengenai konsep partisipasi politik yaitu, bahwa dalam melakukan partisipasi politik, cara yang digunakan salah satunya yang bersifat paksaan (*contentious*).⁶¹ Hasil wawancara penulis diatas, menunjukkan bahwa dalam pilkada 2015 di kabupaten gowa, baik masyarakat maupun PNS dalam menyalurkan

⁵⁹ Saharuddin Dg. Sikki warga Kecamatan Bajeng

⁶⁰ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2016

⁶¹ Dapat dilihat pada <http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/partisipasi-politik.html> diakses pada tanggal 21 agustus 2016

aspirasi suaranya mendapatkan tekanan oleh pemerintah untuk memilih calon yang telah dipilih oleh pemerintah.

Sebagai bupati, Ichsan Yasin Limpo menggunakan birokrasi pada pemerintah Kabupaten Gowa, inilah yang biasanya terjadi dalam pemilukada. Bagaimana penguasa sebelumnya ingin melanjutkan kekuasaannya. Hal ini di perkuat lagi oleh wawancara peneliti dengan Muh. Fitriadi, S.Ip⁶² yang mengatakan :

“...Itulah kenapa ada UU yang mengatur pencalonan petahana, karena salah satu kekhawatirannya petahana itu menggunakan struktur menjadi alat politiknya, itulah kemudian salah satu faktor yang digunakan Adnan kemarin yang memang di wariskan oleh bapaknya...”⁶³

Seperti pasangan Adnan-Kio yang betul-betul memanfaatkan struktur pemerintahan yang ada di kabupaten gowa untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Kabupaten Gowa. Sesuai dengan penjelasan sebelumnya mengenai aktor politik yang dimana, Ichsan Yasin Limpo sebagai aktor politik yang memiliki peran dalam kemenangan Adnan-Kio, maka pengaruh dari Ichsan Yasin Limpo tentu akan mengarah pada kapasitasnya sebagai Bupati. Seperti yang diketahui bersama bahwa Adnan Purichta Yasin Limpo merupakan anak dari Bupati Kabupaten Gowa. Ini tentu menjadi salah satu celah yang di gunakan Adnan-Kio dalam menggerakkan kekuatan birokrasi dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Gowa.

⁶² Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

⁶³ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil secara tegas melarang keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam berkampanye, namun dalam perhelatan Pilkada masih saja ada beberapa oknum birokrasi yang tidak netral. Beberapa diantara mereka mendukung salah satu kandidat. Bahkan aksi itu kadang dilakukan secara terang-terangan dan juga terindikasi adanya aparat yang menggerakkan masyarakat dalam memilih salah satu calon. Hal tersebut dapat tergambarkan dari hasil wawancara penulis dengan Muh. Fitriadi S.Ip⁶⁴, yang mengatakan:

“...Pertama yang harus kita pahami itu pak camat, lurah, desa itu kan aparat pemerintah, secara aturan UU mereka tidak boleh mengarahkan karena pemilu itu umum, bebas, dan rahasia, itu aturan. Jika ada aparat yang mengkampanyekan calonnya maka itu melanggar UU ASM (Aparatur Sipil Negara)....Ada atau tidaknya di bajeng ini, ya kalau kepala desa itu wajar, karena mereka terlahir dari jabatan politik, tetapi kalau PNS, kalau di bajeng itu ada, tetapi yang mungkin dia sebagai pribadi-pribadi manusia biasa, tidak memakai lambangnya sebagai seorang aparat pemerintah kemudian berkampanye ditempat umum itu jelas-jelas melanggar, tapi bisa saja mereka di warung kopi, bisa saja mereka ketemu dengan warga di acara pesta atau di acara ‘apa’ tanpa menggunakan itu mereka juga mengatakan bahwa lebih bagus ini pilihannya...”⁶⁵

Muh. Fitriadi, S.Ip⁶⁶ juga menambahkan :

“...Anda seorang aparat pemerintah sedang memakai baju dinas lengkap dengan lambangnya, anda berkampanye itu pelanggaran tapi anda pakai baju biasa sebagai manusia biasa, sebagai masyarakat biasa juga silahkan, itu hak anda, itu hak politik anda namanya dan dijamin kebebasannya. Itumi saya

⁶⁴ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

⁶⁵ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

⁶⁶ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

bilang, ada tidaknya saya kira itu akan tetap ada...tetapi yang harus kita pahami, baik camat maupu lurah, desa adalah pribadi-pribadi politik, manusia juga tidak bisa dijauhkan dengan politik, artinya mereka juga harus punya pilihan, terserah dia apakah dia bisa memilih bahwa saya sebagai seorang camat saya tidak boleh berkampanye, tapi sebagai pribadi ini haknya orang mau kampanye atau tidak kita juga tidak bisa membebani...”⁶⁷

Hal tersebut menggambarkan, bahwa selama birokrat mampu menempatkan dirinya pada saat Pilkada, yang berarti “dia” mampu menempatkan dirinya sebagai pribadi politiknya pada saat Pilkada, dan tetap menjadi birokrat yang netral pada saat melayani masyarakat luas. Yang berarti, ketika birokrat mengkampanyekan salah satu calon pada saat pilkada berarti hal tersebut dapat tergolong sebagai melanggar aturan yang telah ditetapkan. Dari wawancara tersebut menggambarkan disisi lain, bahwa birokrasi juga dapat dikatakan salah satu faktor yang mampu menyumbangkan kemenangan bagi Adnan-Kio. Ini tidak terlepas dari peran Ichsan Yasin Limpo sebagai Bupati Gowa yang masih menjabat ketika Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, tentu ini yang menjadi faktor utama dalam menggerakkan birokrasi untuk mendukung pasangan Adnan-Kio dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Tergambarkan juga bahwa Aparatur Desa cenderung memberikan seruan kepada masyarakat untuk memilih salah satu calon atau memobilisasi pemilih dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Mobilisasi pemilih juga akan lebih lanjut dibahas dalam sub bab Mobilisasi Pemilih pada pemilihan.

3. Mobilisasi Pemilih pada pemilihan

⁶⁷ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

Mobilisasi massa merupakan kegiatan menggerakkan massa dalam jumlah besar untuk melakukan suatu hal, misalnya demo, kampanye dan lain-lain. Biasanya aksi-aksi ini selalu dibiayai oleh pihak-pihak tertentu, misalnya membayar orang untuk datang ke TPS dan diarahkan untuk memilih pasangan yang telah ditentukan.

Salah satu cara untuk meraih suara yang terbanyak dalam pemilu adalah memobilisasi massa pemilih. Gerakan mobilisasi pemilih kerap terjadi guna meraih dukungan suara mayoritas, dan dalam setiap pelaksanaan pilkada tidak terlepas dari praktik semacam ini. Fenomena demikian memang lumrah terjadi di setiap momentum politik lima tahunan seperti ini.

Seperti yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Gowa tahun 2015. Masyarakat dalam menyalurkan suaranya dimobilisasi untuk memilih pasangan yang telah ditentukan sebelumnya oleh bupati. Hal ini tergambarkan dalam wawancara penulis dengan Bapak Saharuddin Dg. Sikki,⁶⁸ yang mengatakan bahwa:

“...saya lihat penguasa sekarang perlu perubahan caranya memerintah, karena bawahan terus menerus dipaksa, mulai Camat, Kepala Desa, Dusun sampai ke tingkat RW. Memang kalau disini, apalagi kalau ada caleg yang merupakan pilihan Bupati, itu harus didukung, karena kalau tidak akan dianggap sebagai lawannya.”⁶⁹

Selama ini, struktural pemerintahan mulai dari Camat, Kepala Desa hingga sampai ke tingkat masyarakat mendapatkan paksaan dari Bupati. Dalam hal memilih pun masyarakat sudah diatur pilihannya. Masyarakat

⁶⁸ Saharuddin Dg. Sikki warga Kecamatan Bajeng

⁶⁹ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2016

Kabupaten Gowa memilih mengikuti pilihan Bupati, karena menolak pilihan Bupati berarti memilih untuk menjadi lawan. Saharuddin Dg. Sikki

⁷⁰menambahkan:

“...kalau ada desa yang tidak memilih pasangan yang sudah ditentukan, lihat saja pembangunan di desanya. Bahkan ada warga, yang karena diketahui bukan pendukungnya bupati, anaknya tidak diterima masuk di SMAN 1 Bajeng. Jadi masyarakat disini menjadi takut...”⁷¹

Dikatakan bahwa kekuasaan yang dimiliki seseorang atau kelompok lain dapat menentukan tindakan seseorang atau kelompok lain ke arah tujuan dari pihak pertama.⁷² Kekuasaan yang dimiliki oleh Ichsan Yasin Limpo membuatnya lebih mudah dalam memobilisasi pemilih. Melalui jabatannya, Ichsan Yasin Limpo memerintahkan bawahannya untuk mempengaruhi pilihan masyarakat dengan janji-janji baik jabatan maupun materi yang dijanjikan kepada Birokrat. Bantuan ataupun memberikan ancaman tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah menjadi hal digunakan oleh salah satu pasangan pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Hal ini juga dapat tergambarkan dengan wawancara penulis dengan Bapak Muh. Fitriadi, S.Ip⁷³ yang mengatakan, bahwa:

“...Contoh, kalau kau tidak pilih ini, tidak kubantu mko, seorang karaeng bilang begini di sebuah kampung, atau tokoh masyarakat, atau kepala desa, kepala dusun bilang begini di sebuah kampung, kalau kau tidak ikut sama saya, saya tidak akan bantu mko. Masyarakat ini berpikir, ih tidak di kasi maki raskin, tidak di kasi maki BLT (Bantuan Langsung Tunai) & Program Keluarga

⁷⁰ Saharuddin Dg. Sikki warga Kecamatan Bajeng

⁷¹ Wawancara pada tanggal 14 Agustus 2016

⁷² Harold D. Laswell dan Abraham Kaplan, *Power and Society*. (New Haven: Yale University Press, 1950), hlm.74.

⁷³ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

Harapan, dan lain-lain. Itulah mereka tadi, khawatir, mengerti maksudku toh. Inilah yang kemudian dipakai kemarin,...”⁷⁴

Ancaman agar masyarakat mau memilih pasangan Adnan-Kio menjadi kekhawatiran tidak akan mendapatkan bantuan dari pemerintah membuat masyarakat menjadi pragmatis dalam menentukan pilihannya. Kalau pun ada masyarakat yang tetap menolak pilihan Bupati, masyarakat tidak akan mendapatkan pelayanan yang memuaskan dari birokrasi pemerintah Kabupaten Gowa. Senada dengan yang disampaikan oleh bapak Sisgon⁷⁵, ia mengatakan, bahwa:

“...Ini juga karena camat juga sudah dipegang sama bupati, jadi orang-orangnya bupati.”⁷⁶

Penguasaan struktural pemerintahan Kabupaten Gowa oleh Ichsan Yasin Limpo tergambarkan dengan wawancara penulis dengan informan diatas. Hal ini pun dimanfaatkan betul oleh Ichsan Yasin Limpo untuk mempengaruhi pilihan pemilih. Muh. Fitriadi, S.Ip⁷⁷ menambahkan :

“...karena petahana (Ichsan Yasin Limpo) itu selain kultural, dia juga menguasai structural, mulai dari sekda dan jajarannya, para camat, lurah, kepala desa juga dia kuasai, dia perintahkan ke dusunnya, dusunnya perintahkan kader-kader yang jalan itu, yang biasanya kader KB, nanti dia inilah yang menentukan kau miskin, kau tidak miskin dan sebagainya itu. Dan itu masih berlaku disini, orang khawatir nanti kita tidak dapat raskin, akhirnya mereka berlomba menunjukkan ke kepala desa kalau mereka memilih calonnya (Adnan-Kio).”⁷⁸

⁷⁴ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

⁷⁵ Sisgon warga Kecamatan Somba Opu

⁷⁶ Wawancara pada tanggal 5 Agustus 2016

⁷⁷ Muh. Fitriadi, S.Ip warga Kecamatan Bajeng (Anggota DPRD Kabupaten Gowa)

⁷⁸ Wawancara pada tanggal 29 Juli 2016

Hasil wawancara penulis dengan beberapa informan diatas menunjukkan bahwa masyarakat dimobilisasi dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Gowa Tahun 2015. Kecenderungan mobilisasi pemilih pada pemilihan lebih menggunakan ancaman oleh penguasa pada saat Pilkada. Secara psikologis masyarakat akan merasa terancam tidak diberikan bantuan ekonomi, sosial, maupun hukum sehingga masyarakat harus memilih sesuai dengan yang diserukan oleh sang penguasa, sehingga mobilisasi memberikan dampak kemenangan bagi pasangan Adnan-Kio pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Sehingga mobilisasi pemilih dapat dianggap sebagai salah satu faktor yang memenangkan pasangan independen Adnan-Ki dalam Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kabupaten Gowa merupakan salah satu dari sebelas kabupaten di Sulawesi Selatan yang mengikuti pilkada serentak. Dinamika politik di dalam pilkada Kabupaten Gowa sangat tinggi dimana dalam pilkada Kabupaten Gowa ini yang ikut bertarung dalam pemilihan kepala daerah merupakan anak dari petahana yang juga harus melawan tantenya sendiri. Selain itu juga terdapat calon kembali ikut bertarung untuk ketiga kalinya dalam pilkada Kabupaten Gowa ini tetapi tetap gagal meraih kemenangan.

Dalam pilkada Kabupaten Gowa diikuti oleh lima pasang calon dan dua pasang calon diantaranya maju melalui jalur Independen. Hasil pemilihan Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015 tersebut memenangkan salah satu pasangan independen, yaitu Adnan Purichta Ichsan YL, S.H dan H. Abdul Rauf Mallaganni, S.Sos, M.Si. Hal tersebut sangat menarik karena sepertinya kepercayaan masyarakat terhadap calon yang diusung oleh partai politik sudah mulai berkurang. Namun jika melihat jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya, maka bisa dikatakan bahwa partisipasi politik masyarakat Kabupaten Gowa menurun jika dibandingkan dengan pilkada sebelumnya.

Ada pun Hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gowa menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Gowa, khususnya di Kecamatan Somba Opu dan Kecamatan Bajeng

mengenai partisipasi masyarakat dalam memilih calon independen pada Pilkada tahun 2015 Kabupaten Gowa, dan juga faktor apa yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen, ditemukan bahwa, masyarakat tidak mempermasalahkan jalur yang digunakan oleh kandidat, baik melalui jalur partai maupun melalui jalur independen. Dikarenakan pemilih di Kabupaten Gowa lebih melihat sosok kandidat ketimbang melihat jalur yang digunakannya, ini mengindikasikan bahwa kehadiran calon independen pada pilkada Kabupaten Gowa tidak mempengaruhi partisipasi masyarakat.

Hal tersebut juga tergambarkan dari hasil berbagai wawancara yang dilakukan penulis kepada beberapa informan dan berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis. Terlihat juga bahwa dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Gowa tahun 2015, kesadaran politik masyarakat bisa dikatakan masih kurang, hal ini menyebabkan partisipasi masyarakat di Kabupaten Gowa tergolong partisipasi politik aktif namun pragmatis, hal tersebut dipengaruhi oleh faktor psikologis baik dari internal ataupun ekseternal dari pemilih. Pragmatisme jangka pendek pemilih cenderung terbentuk akibat kurang kritis terhadap isu-isu serta adanya kompensasi instan yang ditawarkan oleh kandidat.

2. Adapun tiga faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih calon independen pada Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015 yang ditemukan dari hasil penelitian, yakni :

(1) aktor politik dibalik kemenangan pasangan independen dalam hal ini Adnan-Kio, yakni Ichsan Yasin Limpo, yang juga merupakan ayah dari Adnan Purichta, dimana Ichsan Yasin Limpo Sendiri merupakan Bupati Kabupaten Gowa dua periode dan masih menjabat ketika Pilkada tahun 2015 berlangsung, sebagai bupati tentunya Ichsan Yasin Limpo memiliki kekuasaan dan kekuatan untuk mempengaruhi pilihan politik pemilih, seperti dalam Pilkada Kabupaten Gowa tahun 2015.

(2) Pasangan ini juga memanfaatkan kekuatan birokrasi dalam lingkup pemerintah Kabupaten Gowa, dan ini bukanlah hal yang sulit bagi pasangan ini, karena kita ketahui bersama bahwa yang menjadi bupati pada saat itu ialah Ichsan Yasin Limpo.

(3) Adanya mobilisasi massa pemilih dalam pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015. Pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015, kecenderungan mobilisasi pemilih pada pemilihan lebih menggunakan ancaman oleh penguasa pada saat Pilkada. Secara psikologis masyarakat akan merasa terancam tidak diberikan bantuan ekonomi, sosial, maupun hukum sehingga masyarakat harus memilih sesuai dengan yang diserukan oleh sang penguasa, sehingga mobilisasi memberikan dampak kemenangan bagi

pasangan independen Adnan-Kio pada Pilkada Kabupaten Gowa Tahun 2015.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat memberikan saran :

1. Penulis mengharapkan dari semua pihak baik dari partai politik maupun dari semua kandidat dalam pemilihan kepala daerah, agar kesadaran politik masyarakat semakin ditingkatkan dengan pendidikan politik agar masyarakat tidak lagi pragmatis dalam menentukan pilihannya.
2. Diharapkan agar birokrasi bersifat netral dalam setiap pelaksanaan pemilihan kepala daerah
3. Diharapkan juga agar pengawasan dalam pemilihan kepala Daerah lebih diperketat agar tidak terjadi lagi intervensi dan mobilisasi massa dalam Pilkada-pilkada selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Cristensen, Tom and Per Laegreid. (2005). *Trust in Government: The Relative Importance of Service Satisfaction, Political Factors, and Demography*. Public Performance and Management Review, 28(4) : 487-511.
- Efriza. 2012. *Political Explorer*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Faulks, Keith. 2010. *Sosiologi Politik*. Bandung: Nusa Media.
- Gaffar, Affan. 1998. *Merangsang Partisipasi Politik Rakyat*. Dalam Syarofin Arba (Editor), *Demotologi Politik Indonesia: Mengusung Elitism Dalam Orde Baru*. Jakarta: Pustaka Cidesindo.
- Huntington, Samuel P dan Joan Nelson. 1990. *Partisipasi Politik Di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta.
- J. Prihatmoko, Joko. 2005. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Lewicki, Roy J. (1995). "Trust in Relationship: A Model of Development and Decline". In *Conflict, Cooperation and Justice: Essays Inspired by the work of Morton Deutsch*. Edited by Deutsch, Morton, ed. San Francisco: Jossey-Bass.
- Mas' Oed. 2001. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- May Rudy, Teuku. 2003. *Pengantar Ilmu Politik*, Refika: Bandung.
- Miller, Arthur H. (1974). *Political Issues and Trust in Government: 1964-1970*. American Political Science Review, 68(3): 951-72.
- Rahman, Arifin. 2002. *Sistem Politik Indonesia Dalam Perspektif Structural Fungsional*. Surabaya: Penerbit SIC.
- Rousseau, D.M., Sitkin, S.B., Burt, R.S., & Camerer, C. (1998). *Not so different after all: A cross-discipline view of trust*. Academy of Management Review, 23, 393-404.

Sastroatmodjo, Sujiono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press: Semarang

Schiffman, Leon dkk. (2007). *Interpersonal and political trust: modeling levels of citizens trust*. European Journal; of Marketing.

Surbakti, Ramlan. 1999. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo.

Surbakti, Ramlan. 2007. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Widisarana Indonesia.

Sumber lain

Soekarno,Hatta dalam skripsi perilaku memilih mahasiswa pada pemilihan umum legislative 2009 di kabupaten sinjai. Hal . 5

Sumber internet

<http://setabasri01.blogspot.co.id/2009/02/partisipasi-politik.html> diakses pada tanggal 21 agustus 2016

<http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-pemilihan-kepala-daerah.html> diakses pada tanggal 2 april 2016.

<https://pilkada2015.kpu.go.id/gowakab> diakses pada 10 maret 2016.

Sulhardi, *Political Psycology Socialization and Culture*, dalam <http://pangerankatak.blogspot.com/2008/04/governing-intoduction-to-political>, diakses pada tanggal 4 April 2016.

www.gowakab.go.id diakses pada tanggal 26 juli 2016